

PENELITIAN INSTITUSIONAL

LAPORAN PROGRAM PENELITIAN



JUDUL:

PENGEMBANGAN INDIKATOR SEKOLAH YANG RESPONSIF GENDER

Oleh :

Dr. Marwanti, M, Pd

Dr. Sri Wening, M.Pd

Dr. Wagiran, M.Pd

Rr. Christiana Mayang Anggraeni Stj., S.Pd

Ezra Chica'al Sandya, S.Pd

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TAHUN 2017

PENELITIAN INSTITUSIONAL

LAPORAN PROGRAM PENELITIAN



JUDUL:

PENGEMBANGAN INDIKATOR SEKOLAH YANG RESPONSIF GENDER

Oleh :

Dr. Marwanti, M, Pd

Dr. Sri Wening, M.Pd

Dr. Wagiran, M.Pd

Rr. Christiana Mayang Anggraeni Stj., S.Pd

Ezra Chica'al Sandya, S.Pd

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TAHUN 2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PENGEMBANGAN INDIKATOR SEKOLAH YANG RESPONSIF GENDER

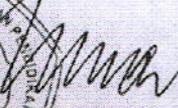
Peneliti/Pelaksana
Nama lengkap : Dr. Dra. Marwanti, M.Pd.
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta
NIDN : 0013035707
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Pend. Teknik Boga - S1
Nomor HP : +628122765767
Alamat surel (e-mail) : marwanti@uny.ac.id

Anggota (1)
Nama Lengkap : Dr. Sri Wening, M.Pd.
NIDN : 0008065708
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta

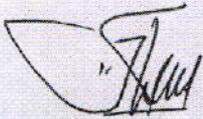
Anggota (1)
Nama Lengkap : Dr. Wagiran, S.Pd..M.Pd.
NIDN : 0027067503
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta

Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra :
Alamat Institusi Mitra :
Penanggung Jawab :
Tahun Pelaksanaan :
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 15.000.000,00

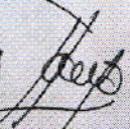
Mengetahui,
Dekan,


Dr. Widarto, M.Pd.
NIP 19631230 198812 1 001

Yogyakarta, 27 Oktober 2017
Ketua Pelaksana


Dr. Dra. Marwanti, M.Pd.
NIP 19570313 198303 2 001

Menyetujui,
Ketua LPPM,


Dr. S. Syanta, M.Si.
NIP 1960508 199203 1 002

PENGEMBANGAN INDIKATOR SEKOLAH YANG RESPONSIF

GENDER

Marwanti, dkk

Isu gender adalah suatu isu ketidakadilan, kesenjangan atau ketimpangan terhadap laki-laki atau perempuan, yang bersifat sistemik, yang mendesak diselesaikan. Kesenjangan gender terjadi dalam berbagai bidang pendidikan, karena minimnya pengetahuan warga sekolah tentang permasalahan gender. Tujuan penelitian ini untuk (1) mempelajari bagaimana sekolah responsive gender diterapkan di sekolah, dan (2) mengembangkan indikator-indikator sekolah yang responsive gender sehingga menjadi acuan bagi guru dan sekolah untuk mengimplementasikannya di sekolah. Metode penelitian menggunakan *research & development*. Subjek penelitian adalah para pemerhati masalah gender, dan guru. Teknik pengumpulan data melalui kunjungan lapangan, wawancara, dan *focus group discussion*. Validasi menggunakan *ekspert judgment*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sekolah yang responsive gender menunjukkan 3 komponen penting, yaitu komponen leadership yaitu peran kepala sekolah, komponen guru yaitu wawasan dan pemahaman guru tentang konsep gender, dan sarana prasarana untuk mendukung implementasi pengarus utamaan gender dalam aktivitas di sekolah. (2) Indikator-indikator yang dikembangkan menuju sekolah responsive gender adalah mengacu pada delapan standar pendidikan nasional pendidikan yaitu kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian. Masing-masing standar tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi 56 butir item yang divalidasi.

Kata kunci: Sekolah, gender, standar nasional pendidikan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
BAB II. KAJIAN TEORI	7
1. Konsep Gender.....	7
2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kesenjangan Gender	10
3. Bentuk-bentuk Ketidak Adilan Gender di Masyarakat.....	11
4. Bias Gender Dalam Pendidikan.....	11
5. Sekolah yang Responsif Gender.....	14
6. Standar Nasional Pendidikan.....	16
BAB III. METODE PENELITIAN.....	18
A. Tempat dan Waktu Penelitian	18
B. Model Pengembangan.....	18
C. Uji Coba Produk.....	20
D. Teknik Analisis Data.....	22
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Data Hasil Penelitian.....	24
1. Hasil Penelitian Tahap <i>Research</i>	24
2. Pemahaman Guru dan Warga Sekolah tentang Konsep Gender.....	27
3. Sarana dan Prasarana yang Responsif Gender.....	29
4. Hasil Uji Validasi dan Revisi terhadap Indikator Sekolah yang Responsif Gender dari Para Ahli.....	34
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	49
A. Simpulan.....	49
B. Keterbatasan Penelitian.....	49
C. Saran Pemanfaatan.....	50

D. Diseminasi dan Perkembangan Produk Lebih Lanjut.....	50
E. Keunggulan dan Kelemahan Produk	34
DAFTAR PUSTAKA	52

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa merahmati dan memberkahi peneliti sehingga laporan hasil penelitian ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyelesaian laporan hasil penelitian ini, penulis selalu berusaha dengan sekuat kemampuan agar laporan hasil penelitian tidak menyimpang dari syarat-syarat yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan ilmiahnya. Namun demikian, sebagai makhluk insani yang terbatas akan kesemestaan alam ini, penulis pun tidak mungkin luput dari khilaf dan kekurangan-kekurangan, maka apa yang diharapkan barangkali masih jauh dari kesempurnaan penulisan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis dengan senang hati dan tangan terbuka menerima segala saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pihak manapun juga untuk menuju ke arah perbaikan demi mencapai kesempurnaan laporan penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari pihak lain penelitian ini tidak dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UNY, yang memberikan bantuan dana penelitian ini.
2. Kepala LPPM UNY yang telah memfasilitasi penelitian ini
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY dalam hal ini Bagaian PNFI, yang telah melakukan kerjasama dalam pelaksanaan penelitian ini.
4. Kepala SM N 2 Bantul serta para guru sebagai validator instrumen sebagai indikator sekolah responsif gender.

Semoga pihak-pihak yang saya sebutkan di atas senantiasa diberkahi Allah SWT,

Yogyakarta, 26 Nopember 2017

Peneliti

Dr. Marwanti

Dr. Sri Wening

Dr. Wagiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai masalah yang masih dihadapi di Indonesia saat ini adalah masih tingginya angka kemiskinan, dimana pada tahun 2011 mencapai 16,08%, laju pertumbuhan ekonomi yang masih relatif rendah. Infrastruktur masih kurang merata, serta ketimpangan antar wilayah cukup tinggi, menuntut penanganan di berbagai bidang, baik bidang kependudukan, ekonomi, ketenagakerjaan, social dan bidang pendidikan.

Kemiskinan berwajah perempuan, pendidikan akan terkait dengan masalah ekonomi, dimana akses dan kontrol sumberdaya perempuan bisa ditemukan di berbagai level, ketimpangan upah, akses kepada pekerjaan dan pengembangan karier. Hal ini menunjukkan bahwa mengurangi kesenjangan berbasis gender bukan hal yang mudah, harus diperjuangkan dari berbagai segi, termasuk menciptakan sekolah yang responsive gender.

Penduduk adalah sumberdaya sekaligus penerima manfaat pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas menjadi modal dalam pembangunan, namun sumberdaya yang tidak atau kurang berkualitas akan menjadi beban dalam pembangunan. Jumlah penduduk di DIY tahun 2016 sebanyak 3.720.912, dimana 50,55% adalah perempuan, artinya jumlah perempuan lebih banyak dibanding dengan penduduk laki-laki, di semua kabupaten/kota, kecuali kabupaten Sleman dimana jumlah perempuan lebih sedikit dibanding dengan laki-laki. (Hasil analisis Isu Gender, BPPM: 2017).

Pendidikan merupakan kunci keberhasilan masa depan, karena melalui pendidikan masyarakat dibekali perangkat sikap, cara pandang dan nilai-nilai yang relevan untuk masa mendatang. Oleh karena itu pendidikan yang relevan adalah pendidikan yang mampu

memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, kebutuhan masyarakat, maupun kebutuhan pembangunan.

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, seperti pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi dosen, melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Namun kualitas pendidikan nasional tetap memprihatinkan, solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan belum ditemukan.

Sekolah sebagai wadah pendidikan formal sangat penting dalam membentuk dan menyiapkan dan memposisikan individu pada golongan atau strata tertentu di dalam masyarakat. Secara umum lembaga ini diwarnai oleh kemampuan ekonomi seseorang atau sekelompok tertentu, aspek politik, budaya dan ideologi gender.

Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pendidikan mengamanatkan agar setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya. Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, (tiga lintas bidang “cross cutting issue” dalam pembangunan: Pembangunan berkelanjutan, *Good government*).

Kebijakan pengarusutamaan gender dibangun berdasarkan strategi untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integrasi dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Tujuannya adalah mempersempit dan meniadakan kesenjangan gender yang mengantarkan pada pencapaian keteraan dan keadilan gender. Salah satu kunci yang menjadi prasyarat dalam

implementasi pengarusutamaan gender adalah sumberdaya yang memadai, yang meliputi sumberdaya manusia yang memiliki kesadaran, kepekaan, respon, keterampilan, dan motivasi yang kuat dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di unitnya, dan adanya sumber dana dan sarana yang memadai untuk melaksanakan pengarusutamaan gender. .

Isu gender adalah suatu isu ketidakadilan, kesenjangan atau ketimpangan terhadap laki-laki atau perempuan, yang bersifat sistemik, dirasakan oleh sebagian besar orang dan di banyak tempat, mendesak diselesaikan, karena memiliki daya ungkit kepada penyelesaian isu lain bila isu tersebut diselesaikan.

Kesejangan gender terjadi dalam berbagai bidang pendidikan, karena minimnya pengetahuan warga sekolah tentang permasalahan gender, sehingga dapat diamati beberapa fenomena yang terjadi di sekolah antara lain: (1) materi bahan ajar pada umumnya masih bias gender, (2) proses pembelajaran di kelas belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif secara seimbang antara peserta didik laki-laki dan perempuan; (3) lingkungan fisik sekolah belum menjawab kebutuhan spesifik anak laki-laki dan perempuan; dan (4) pengelolaan pendidikan belum dilaksanakan kearah adil gender atau memberikan peluang yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Fenomena tersebut harus diatasi, dengan cara memberi wawasan kepada warga sekolah, bagaimana kriteria sekolah yang responsive gender, sehingga sekolah dapat menciptakan iklim akademis yang terdiri dari aspek pembelajaran, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang mendukung adanya integrasi keadilan dan kesetaraan gender di bidang pendidikan.

Pentingnya dipunyai sekolah yang responsive gender adalah Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang pelaksanaan pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan

Gender dalam Bidang Pendidikan mengamanatkan agar setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya. Selain itu Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, (tiga lintas bidang “cross cutting issue” dalam pembangunan: Pembangunan berkelanjutan dan Good government)

Mensikapi hal ini Dinas Pendidikan di DIY telah merespon program pemerintah dengan mensosialisasikan sekolah yang responsive gender. Namun berbagai kendala ditemui, antara lain secara mendasar gender belum dipahami secara jelas, sehingga perangkat sekolah dan guru masih kesulitan menterjemahkan bagaimana sekolah yang responsive gender.

Indikator sekolah yang responsive gender secara sporadis telah dicanangkan, namun pengembangannya untuk berbagai satuan pendidikan berdasarkan setiap jenjang satuan pendidikan belum terinci secara jelas, karena selama ini berbagai hal ditemui misalnya materi /bahan ajar pada umumnya masih bias gender, proses pembelajaran di kelas belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif secara seimbang antara peserta didik laki-laki dan perempuan; lingkungan fisik sekolah belum menjawab kebutuhan spesifik anak laki-laki dan perempuan; dan pengelolaan pendidikan belum dilaksanakan kearah adil gender atau memberikan peluang yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Pengembangan indikator-indikator bagi sekolah yang responsive gender perlu dilakukan, sehingga diharapkan dapat dihasilkan acuan bagi sekolah untuk mengatasi berbagai kendala dalam menyosialisasikan sekolah yang responsive gender.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat diidentifikasi berbagai masalah yaitu :

1. Belum tersosialisasinya secara baik tentang sekolah yang responsive gender
2. Dinas sudah mencoba mensosialisasikan pada beberapa perwakilan sekolah, namun belum direspon secara baik.
3. Rendahnya persepsi guru dan sekolah tentang sekolah yang responsive gender
4. Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Ppembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, (tiga lintas bidang “cross cutting issue” dalam pembangunan: Pemb berkelanjutan, Good government)
5. Permasalahan dalam link satuan pendidikan
6. Materi bahan ajar pada umumnya masih bias gender;
7. Proses pembelajaran di kelas belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif secara seimbang antara peserta didik laki-laki dan perempuan;
8. Lingkungan fisik sekolah belum menjawab kebutuhan spesifik anak laki-laki dan perempuan; dan
9. pengelolaan pendidikan belum dilaksanakan kearah adil gender atau memberikan peluang yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

C. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana responsive gender diterapkan di sekolah?
2. Bagaimana mengembangkan indikator sekolah yang responsive gender?

3. Bagaimana efektifitas indikator sekolah yang responsive gender?

D. Tujuan Penelitian:

1. Mendapatkan gambaran penerapan sekolah yang responsif gender selama ini pada setiap satuan pendidikan di DIY
2. Menghasilkan indikator-indikator bagi sekolah yang responsive gender yang valid dan efektif.

BAB II

KAJIAN TEORI

I. Konsep Gender

Gender merupakan konstruksi sosial mengenai perbedaan peran dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. (Wagiran dkk, 2015, Nurhayati, 2015). Peran dan kesempatan yang termuat dalam konstruksi tersebut dapat berubah sesuai dengan perbedaan waktu, tempat, budaya, maupun perubahan tata nilai. Buku saku yang dikeluarkan oleh kantor Bea Cukai Tanjung perak dikatakan bahwa Gender adalah karakteristik sosial sebagai laki-laki dan perempuan seperti yang diharapkan oleh masyarakat budaya melalui sosialisasi yang diciptakan oleh keluarga dan/atau masyarakat, yang dipengaruhi oleh budaya, interpretasi agama, struktur social dan politik.

Banyak diantara kita yang kurang menyadari bahwa konstruksi sosial tentang gender merupakan buatan manusia. Oleh karena itu konstruksi tersebut bersifat dinamis, dalam artian peran dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki dapat dipertukarkan. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Depdiknas (2008:7) bahwa gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara social dan budaya. Hal ini berbeda dengan jenis kelamin yang merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrat. Kodrat merupakan pemberian dari Yang Maha Kuasa, sehingga ciri dan fungsinya tetap tidak dapat dipertukarkan.

Kebudayaan suatu masyarakat, telah terjadi penetapan-penetapan pekerjaan yang dikaitkan dengan jenis kelamin. Penetapan tersebut kadang membatasi pilihan-pilihan terhadap karier atau pekerjaan seseorang. Sebagai contoh pilihan pendidikan sebagai juru

masak banyak didominasi oleh perempuan, namun sebaliknya pekerjaan sebagai chef banyak didominasi oleh laki-laki.

Pada kenyataannya laki-laki dan perempuan hanya dapat dibedakan oleh fungsi atau karakteristik yang berhubungan dengan kegiatan reproduktif saja, sedangkan gender hanyalah peran sosial yang berasal dari kelompok masyarakat tertentu. Berikut perbedaan biologis laki-laki dan perempuan berikut fungsi reproduksinya. Perbedaan Biologis laki-laki dan Perempuan dilihat berdasarkan table berikut:

Tabel 1. Perbedaan Biologis Laki-laki dan Perempuan

	Laki-laki	Perempuan
Ciri Primer	Penis Kantung zakar Buah zakar Sperma Prostat Kromosom XY	Vagina Ovarium (Indung Telur) Ovum (Sel telur) Uterus Menstruasi Kromosom XX
Ciri Sekunder	Bulu dada Jakun Suara berat Berkumis	Kuit halus Suara halus Dada besar

Sumber : Kokom Komariah (Jurnal Media Komunikasi Vokasi, Malang.....)

Berdasarkan ciri-ciri primer dan sekunder tersebut, maka hal yang tidak bisa dipertukarkan adalah pada perempuan adalah menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui dengan Asi. Sedang pada laki-laki adalah membuahi karena mempunya spermatozoa.

Selanjutnya perbedaan sifat, peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil rekonstruksi sosial dinamakan gender. Konstruksi sosial itu disebabkan oleh keluarga, interpretasi agama, sekolah, media masa, masyarakat, negara dan tempat kerja. Gender

ini melahirkan stereotipe bahwa laki-laki bersifat maskulin, mempunyai fungsi produksi, berkiprah di sektor publik dan pencari nafkah utama. Sedangkan perempuan bersifat feminim, berfungsi reproduksi, ruanglingkupnya di sektor domestik, dan pencari nafkah tambahan.

Dengan demikian maka gender berbeda dengan jenis kelamin, gender adalah konstruksi masyarakat, buatan manusia, tidak bersifat kodrat tidak dapat ditukar, dan tergantung pada waktu dan tempat, sedangkan jenis kelamin merupakan ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat ditukar dan berlaku sepanjang jaman.

Tabel 2. Perbedaan gender dan jenis kelamin

<i>Jenis Kelamin (SEX)</i> Perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan berdasarkan ciri primer dan sekunder	<i>Gender</i> Perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dibuat/dikonstruksikan oleh masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Ciptaan Tuhan • Bersifat kodrat • Tidak dapat dirubah • Tidak dapat ditukar • Berlaku sepanjang zaman dan dimana saja 	<ul style="list-style-type: none"> • Buatan manusia • Tidak bersifat kodrat • Dapat berubah • Dapat ditukar • Tergantung waktu dan tempat

Peran perempuan dan laki-laki dalam dunia kerja, sesungguhnya tidak dibatasi, pekerjaan memasak sesungguhnya tidak didominasi oleh perempuan, tetapi laki-laki banyak yang lebih hebat. Demikian juga seorang pemimpin, tidak harus laki-laki, karena terbukti perempuan juga bisa menjadi pemimpin yang hebat. Oleh karena itu dalam memilih pekerjaan harus berdasarkan preferensi individual, kompetensi dan peluang pasar yang ada bukan pada jenis kelamin.

Terkait dengan pemahaman konsep gender nampaknya beberapa hal perlu dikaji beberapa istilah dalam memahami konsep gender, meliputi isu gender, stereotype gender, kesetaraan gender dan adil gender.

Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu adanya kesenjangan antara kondisi normatif yang dicita-citakan dengan kondisi subjektif gender sebagaimana adanya.

Kesetaraan Gender adalah hasil dari perilaku adil gender yang terukur dari kesamaan/kesetaraan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia terhadap akses dan manfaat dari usaha pembangunan dan mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam penguasaan sumberdaya pembangunan (pengetahuan, informasi, keterampilan).

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan gender.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan gender. Faktor-faktor tersebut antara lain :

- a. Nilai sosial dan budaya patriarki
- b. Produk dan peraturan perundang-undangan yang masih bias gender
- c. Pemahaman ajaran agama yang tidak komprehensif dan cenderung parsial
- d. Kelemahan, kurang percaya diri, tekad, dan inkonsistensi kaum perempuan sendiri dalam memperjuangkan nasibnya.
- e. Kekeliruan persepsi dan pemahaman para pengambil keputusan, Tokoh Masyarakat (TOMA), Tokoh Agama (TOGA) terhadap arti dan makna Kesetaraan dan Kesenjangan Gender (KKG).

3. Bentuk-bentuk Ketidak Adilan Gender di Masyarakat

- a. Subordinasi yang berarti posisi atau peran yang dinilai lebih rendah dari peran yang lain, saat ini perempuan dianggap lebih rendah dari peran yang lain. Ketidakadilan gender saat ini adalah adanya penilaian posisi atau peran perempuan dalam masyarakat yang dianggap lebih rendah dari posisi atau peran laki-laki.
- b. Marjinalisasi dengan maksud peminggiran peran ekonomi dan politik dengan asumsi bahwa perempuan adalah pencari nafkah tambahan, serta anggapan bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Perempuan
- c. Peran Ganda merupakan masuknya perempuan ke sektor publik tidak diiringi dengan berkurangnya beban kerja mereka di dalam rumah tangga. Peran reproduktif perempuan dianggap hanya menjadi tanggung jawab perempuan.
- d. Kekerasan terhadap perempuan seringkali berwujud pengabaian hak-hak mereka sebagai akibat pelaksanaan pembangunan yang bias gender. Anggapan perempuan sebagai makhluk yang lemah, sering disalahartikan sebagai alasan untuk memperlakukan perempuan secara semena-mena dalam bentuk kekerasan fisik dan non fisik.
- e. Stereotype atau pelabelan berarti label atau cap yang dikenakan kepada seseorang sehingga menimbulkan anggapan yang salah. Misalnya produktivitas perempuan lebih rendah maka dibayar lebih rendah.

4. Bias Gender Dalam Pendidikan

Bias gender adalah mengunggulkan salah satu jenis kelamin dalam kehidupan sosial atau kebijakan publik. Bias gender dalam pendidikan adalah realitas pendidikan yang mengunggulkan

suatu jenis kelamin tertentu sehingga menyebabkan ketimpangan gender. (Hanun Asrohah, 2008: 178). Secara garis besar, fenomena kesenjangan gender dalam pendidikan dapat diklasifikasi dalam beberapa dimensi, antara lain: (1) Kurangnya partisipasi (*under-participation*). Dalam hal partisipasi pendidikan, perempuan di seluruh dunia menghadapi problem yang sama. Dibanding lawan jenisnya, partisipasi perempuan dalam pendidikan formal jauh lebih rendah. Di negara-negara dunia ketiga dimana pendidikan dasar belum diwajibkan, jumlah murid perempuan umumnya hanya separuh atau sepertiga jumlah murid laki-laki. (Amansari : 2005: 30) . (2) Kurangnya keterwakilan (*under-representation*). Partisipasi perempuan dalam pendidikan sebagai tenaga pengajar maupun pimpinan juga menunjukkan kecenderungan disparitas progresif. Jumlah guru perempuan pada jenjang pendidikan dasar umumnya sama atau melebihi jumlah guru laki-laki. Namun, pada jenjang pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi, jumlah tersebut menunjukkan penurunan drastis. (3) Perlakuan yang tidak adil (*unfair treatment*). Kegiatan pembelajaran dan proses interaksi dalam kelas seringkali bersifat merugikan murid perempuan. Guru secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian yang lebih besar kepada murid laki-laki dibanding murid perempuan. Para guru kadangkala cenderung berpikir ke arah "*self fulfilling prophecy*" terhadap siswa perempuan karena menganggap perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan yang tinggi.

Selain itu dimensi akses adalah fasilitas pendidikan yang sulit dicapai atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya tanpa memiliki otoritas untuk memutuskan terhadap produk/hasil maupun metode pendayagunaan sumber daya tersebut. Dimensi proses pembelajaran adalah materi pendidikan seperti misalnya yang terdapat dalam contoh-contoh soal dimana semua kepemilikan selalu mengatasnamakan laki-laki. Dalam buku-buku pelajaran seperti misalnya semua jabatan formal dalam buku seperti camat dan direktur digambarkan

diatur oleh laki-laki. Selain itu ilustrasi gambar juga bias gender, yang seolah-olah menggambarkan bahwa tugas wanita adalah sebagai ibu rumah tangga dengan tugas-tugas menjahit, memasak dan mencuci. Faktor penyebabnya *stereotype gender*. Dimensi penguasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memajukan peranannya dalam masyarakat. Dimensi kontrol adalah kemampuan atau otoritas untuk memutuskan menggunakan produk atau hasil, bahkan juga untuk menentukan metode pendaayagunaannya, sehingga memiliki kekuatan untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya tersebut. Faktor penyebabnya tidak memiliki otoritas atau kemampuan untuk menggunakan maupun mendayagunakan sumber daya. Dimensi manfaat adalah sesuatu yang baik untuk didapatkan atau diterima oleh seseorang dari proses penggunaan atau mendayagunakan sumber daya. Faktor penyebabnya dimensi akses, kontrol, maupun partisipasi yang didapatkan kecil.

Persamaan memperoleh kesempatan pendidikan adalah hak asasi yang melekat pada anak sebagai warga Negara agar mereka dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan kecakapan dan keahlian, sehingga pada saatnya mereka akan memberikan kontribusi untuk memacu pembangunan di segala bidang.

Berbagai isu gender dalam bidang pendidikan yang teridentifikasi oleh BPPM Yogyakarta (2007) adalah

- a. Kesenjangan antar kabupaten/kota; Harapan Lama Sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS), disparitas bukan hanya terjadi antar kabupaten/kota, namun terjadi juga antar jenis kelamin, terjadi kesenjangan yang cukup tajam antara wilayah perkotaan (Yogyakarta dan Sleman) dengan wilayah pedesaan, terutama di daerah Gunung Kidul. Kabupaten gunung kidul masih di bawah rata-rata Indonesia dari aspek harapan lama sekolah dan rata-rata sekolah pada laki-laki dan perempuan.

- b. Kesenjangan dalam bidang Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat SD, SLTP lebih tinggi dibanding perempuan, namun di tingkat SLTA, APM perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan APM tertinggi di semua wilayah, namun kota Sleman memperhatikan pola yang berbeda dimana APM laki-laki lebih rendah dibanding perempuan sejak SLTP.
- c. Angka Partisipasi Kasar di DIY memperhatikan masih adanya kesenjangan antar kabupaten kota di setiap jenjang pendidikan. Bila dilihat dari jenis kelamin APK perempuan lebih tinggi dibanding APK laki-laki mulai jenjang SLTP. Namun di jenjang SLTA, Kulonprogo dan Gunung Kidul memperlihatkan pola yang berbeda., dimana APK laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan.
- d. Angka Partisipasi Sekolah, dilihat dari jenis kelamin APS laki-laki DIY lebih tinggi dibanding perempuan, kecuali usia 13-15 tahun. Namun di Kota Yogyakarta dan Gunung Kidul memperlihatkan APS laki-laki lebih tinggi dibanding APS perempuan di usia 13-15 tahun., sementara di rentang usia 16-18 tahun kota Yogyakarta dan Sleman menunjukkan bahwa APS perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.

Data-data di atas menunjukkan bahwa isu gender masih dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, peningkatan melek huruf, seperti halnya tuntutan otonomi/kemiskinan bahwa laki-laki harus bertanggung jawab dalam pemenuhan ekonomi keluarga menjadi hal berkontribusi bagi rendahnya melek huruf laki-laki dibanding perempuan di kabupaten Gunung Kidul.

5. Sekolah yang Responsif Gender

Sekolah responsif gender adalah sekolah dimana aspek akademik, sosial, lingkungan fisik maupun lingkungan masyarakatnya memperhatikan secara seimbang kebutuhan spesifik anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada sekolah responsif gender, maka guru/pendidik, tenaga kependidikan, orangtua, tokoh dan anggota masyarakat disekitarnya, serta peserta didik laki-laki dan perempuan menyadari akan pentingnya keadilan dan kesetaraan gender dan oleh karena itu mempraktekkan tindakan-tindakan yang setara dan adil gender (Depdiknas, 2008: 5-6).

Komponen sekolah responsif gender, menurut direktorat jendral pendidikan non formal dan informal meliputi (1) Aspek akademis, mencakup: materi bahan ajar, proses belajar mengajar, interaksi guru/pendidik-peserta didik dan evaluasi pembelajaran memperhatikan secara seimbang kebutuhan spesifik anak laki-laki dan perempuan. (2) Aspek sosial, mencakup: interaksi antar peserta didik, interaksi antar guru/pendidik-orangtua dan kegiatan intra kurikuler serta ekstra kurikuler yang memperhatikan secara seimbang kebutuhan spesifik anak laki-laki dan perempuan. (3) Aspek lingkungan fisik, mencakup: lingkungan sekolah, penyediaan fasilitas peserta didik-guru/pendidik, alat peraga dan media KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) memperhatikan secara seimbang kebutuhan spesifik anak laki-laki dan perempuan. (4) Aspek lingkungan masyarakat, mencakup: apakah masyarakat telah mendukung adanya integrasi keadilan dan kesetaraan gender di bidang pendidikan.

Selama ini telah banyak terjadi kesalahan isu gender di kalangan pendidik seperti anggapan bahwa bahwa lebih rendahnya prestasi belajar peserta didik laki-laki, peserta didik perempuan agar tidak ekspresif dalam mengemukakan pendapat, dan kecenderungan menggunakan materi atau contoh-yang biasa gender.

Berbagai anggapan dan kebiasaan yang salah tersebut dapat dianalisis bahwa prestasi belajar anak laki-laki lebih rendah karena mereka lebih malas dibandingkan perempuan, hal ini bisa diatasi melalui pembiasaan sikap dan perilaku disiplin. Selain itu pendidik kurang memberi kesempatan kepada anak perempuan karena pengaruh nilai-nilai sosial budaya bahwa perempuan sebaiknya tidak ekspresif mengemukakan pendapat. Dan kesalahan lain karena sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang mengakar sejak lama.

6. Standar Nasional Pendidikan

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lingkup Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. **Standar isi** adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- b. **Standar proses** adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- c. **Standar kompetensi lulusan** adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- d. **Standar pendidik dan tenaga kependidikan** adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- e. **Standar sarana dan prasarana** adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan

berkreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

- f. **Standar pengelolaan** adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- g. **Standar pembiayaan** adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; dan
- h. **Standar penilaian pendidikan** adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.



Gambar 1. Model 1

BAB

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dikategorikan penelitian dan pengembangan dan akan dilaksanakan sekolah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu penelitian dimulai sejak proposal ini disetujui, pada bulan April sampai November 2017.

B. Model Pengembangan

Pengembangan pengembangan indikator sekolah yang responsif gender merupakan aktivitas utama dalam penelitian ini. Model pengembangan penelitian ini menggunakan model *Research and Development* yang pokok-pokok kegiatannya diambil dari Borg dan Gall, (1989: 784). Tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Pengembangan Berdasarkan Borg and Gall (1989)

Sesuai dengan tahapan penelitian, penjabaran langkah tersebut dapat diuraikan menurut Borg and Gall (1989: 784) sebagai berikut:

- 1) Tahap penelitian dan pengumpulan informasi (*research and information collecting*), termasuk dalam langkah ini adalah *need assesment, study literature* dan *review literature*. yang dilakukan di industri dan lembaga pendidikan untuk menjangring berbagai masalah

termasuk persiapan untuk memulai penelitian. Pendekatan yang akan digunakan adalah kualitatif.

- 2) Tahap perencanaan (*planning*), Pada tahap ini dilakukan penyaringan hasil yang diperoleh dari tahap pertama, yaitu merumuskan produk penelitian. .
- 3) Tahap membangun perencanaan produk (*develop preliminary form of product*). Tahap ini merupakan tahapan besar dalam penelitian, karena bagaimana membangun produk awal yang dapat diterapkan, yaitu hipotetik model, empirical model dan produk penelitian..
- 4) Tahap melakukan uji pendahuluan di lapangan (*preliminary field testing*), yaitu melakukan uji coba lapangan awal secara terbatas untuk memperoleh respon dan *feed back* dari pengguna tentang produk baru yang dikembangkan.
- 5) Tahap melakukan revisi produk (*main product revision*), adalah merevisi produk utama setelah data yang didapatkan dari uji terbatas dianalisis, kemudian peneliti menggunakan hasil data ini untuk merencanakan dan membuat revisi terhadap produk utama yang dihasilkan. .
- 6) Tahap melakukan uji coba produk di lapangan (*main field testing*). Tujuannya untuk menentukan apakah hasil pengembangan produk baru dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan dalam revisi berikutnya.
- 7) Tahap revisi produk operasional (*operational product revision*). Pada tahap ini dilakukan revisi berdasarkan data atau uji lapangan yang telah dilakukan, meliputi identifikasi kekurangan dan kelemahan produk dan melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap produk..

- B) Tahap melakukan uji operasional (*operational field testing*). Tahap ini untuk menunjukkan apakah produk sudah sepenuhnya siap untuk digunakan tanpa kehadiran peneliti.
- C) Tahap revisi produk akhir (*final product revision*), yaitu melakukan perbaikan akhir berdasarkan produk yang disarankan dari tahap operasional lapangan dan hasil-hasil pengujian.
- D) Tahap penyebarluasan dan implementasi (*desemination and implementation*) Tahapan yang dilakukan adalah membuat laporan penelitian, sosialisasi produk, penyebarluasan melalui jurnal ilmiah.

C. Uji Coba Produk

Uji coba produk bertujuan untuk menguji model indikator sekolah yang responsif gender. Untuk itu beberapa kegiatan dapat dideskripsikan antara lain.

D) Desain Uji Coba

Sebagai langkah awal dalam uji coba dibuat desain tahapan pengembangan Uji coba dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan Produk

Dalam perencanaan produk dilakukan kajian kajian teori tentang bagaimana seharusnya PUG diterapkan di sekolah, apa yang diperjuangkan melalui PUG, hambatan yang mungkin dijumpai, dan bagaimana solusi yang mungkin dilakukan untuk mengimplementasikan PUG di sekolah. Selanjutnya dilakukan kunjungan ke sekolah (best practice) yang telah menerapkan sekolah berwawasan gender, dalam hal ini kunjungan dilakukan ke SMAN 2 Bantul.

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris tersebut selanjutnya peneliti merancang produk, membuat kiisi-kisi dan mengembangkan item-item bagaimana sekolah yang responsive gender.

b. Tahap Membangun Perencanaan Produk dan Validasi Awal

Guna memperkuat produk yang dihasilkan, peneliti melakukan FGD dan konsultasi dengan beberapa pakar terkait, khususnya dengan para pemerhati masalah gender di beberapa perguruan tinggi, dalam hal ini dilakukan dalam forum seminar yang dilakukan di Salatiga pada tanggal 19 Agustus 2017. Masukan-masukan hasil diskusi digunakan sebagai kegiatan membangun produk, dan kegiatan konsultasi sebagai kegiatan validasi awal sehingga menghasilkan produk dengan prototype 1.

Hasil validasi menghasilkan beberapa masukan bagi penyempurnaan produk. Oleh karena itu produk disempurnakan lagi, sehingga menghasilkan produk dengan prototype 2. Selanjutnya dilakukan validasi empirik untuk melihat apakah indikator yang dikembangkan memenuhi kriteria praktis dan efektif. Untuk maksud tersebut dilakukan uji coba lapangan kepada guru-guru pada berbagai jenjang satuan pendidikan.

2) Subjek Uji Coba

Subjek uji coba pertama dilakukan pada pakar terkait, uji coba produk ke dua dilakukan kepada guru-guru pada setiap jenjang pendidikan dari SD, SMP dan SMA dan SMK yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3) Jenis Data

Penelitian pengembangan terdiri dari 2 (dua) kegiatan utama yang terdiri dari *research and development*. Setiap tahap penelitian memerlukan data sesuai dengan tujuan tahapan tersebut. Pada tahap *research* dibutuhkan data yang akan digunakan sebagai dasar perancangan

model, data diperoleh melalui studi pendahuluan, kajian teori dan kajian empirik, dilanjutkan dengan Focus Group Discussion. Pada tahap *development* dibutuhkan data berkaitan dengan indikator sekolah yang responsive gender. Data yang dibutuhkan antara lain; (1) membangun produk, (2) validasi terhadap model yang dikembangkan. (3) respon guru dan (4) keefektifan model.

4) Instrumen Pengumpul Data

Instrumen digunakan apabila sudah memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas, karena itu instrument sebelumnya divalidasi terlebih dahulu. Sesuai dengan fokus penelitian, instrumen yang dikembangkan terdiri dari: (a) Instrumen untuk merancang dan membangun model, dan (b) Instrumen untuk menguji kepraktisan dan efektifitas model. Instrumen untuk merancang model dikembangkan berdasarkan konten, sistematika dan fisik dari model dan perangkatnya, sedangkan instrumen untuk menguji efektifitas model mengacu pada evaluasi model dari Kirpatrick yaitu terdiri dari evaluasi reaksi, melihat bagaimana tanggapan guru dan tokoh gender, evaluasi learning merupakan evaluasi hasil, behavior dan result.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif digunakan untuk menilai validitas isi, kepraktisan dan keefektifan model sesuai dengan model tujuan penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian ditelaah, diklasifikasi dan digolongkan sesuai dengan tematiknya. Analisis data kualitatif dijelaskan melalui narasi yang jelas dan logis berdasarkan data yang diperoleh dari subjek penelitian.

Validitas isi yang dilakukan oleh para ahli dan praktisi berupa masukan, tanggapan, kritik dan saran dirangkum, dikelompokkan, dikategorikan, diranking. Demikian penggunaan

analisis data kualitatif yang dihimpun melalui wawancara, observasi, angket, dianalisis secara deskriptif *persentase, mean, dan tendency central*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Hasil Penelitian

Bab ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu hasil analisis terhadap tahap *research* atau pra-pengembangan dan analisis terhadap kegiatan pengembangan. Pada tahap *research* dilakukan *need assesment* dari para pemerhati masalah gender, kunjungan lapangan sebagai kegiatan best practice sekolah yang menerapkan sekolah responsive gender di sekolah. Hasil *needs assesment* digunakan untuk pengembangan produk, berupa instrument yang akan digunakan untuk acuan pengembangan sekolah yang responsive gender.

1. Hasil Penelitian Tahap Research

Sesuai dengan tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan masukan aspek-aspek apa yang diperlukan untuk mengembangkan indicator-indikator sekolah yang responsive gender, dilakukan survey, wawancara dan *Focus Group Discusion* (FGD). Survey ke sekolah dimaksudkan untuk mendapat gambaran tentang indicator-indikator sekolah yang responsive gender.

Hasil survey ke SMAN 2 Bantul sebagai kegiatan best practice menunjukkan bahwa sekolah yang responsive gender ditemukan 3 aspek penting yaitu: 1) Leadership kepala sekolah. 2) Pemahaman guru dan warga sekolah tentang gender, 3) Sarana dan fasilitas pendukung dalam penerapan PUG di sekolah.

1). Leadership

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menterjemahkan visi ke dalam kenyataan (Warren G. Bennis: 2014). Pemimpin, dalam hal ini kepala sekolah sangat kuat dalam mengembangkan sekolah yang responsive gender, dengan menjalankan fungsi manajemen dan kepemimpinan, baik dalam pengelolaan SDM, sarana dan prasarana sekolah. Kepala sekolah dapat mengarahkan, dan mengembangkan budaya sekolah, menjadi inspirator dan komunikator yang menghubungkan sekolah dengan masyarakat. Kepala sekolah sebagai pendorong terjadinya perubahan dan pengembangan budaya, dalam fungsi transformative kepala sekolah.

Hasil kegiatan pengamatan dalam kegiatan best practice ini nampak sekali bahwa kepala sekolah SMAN 2 Bantul mempunyai kemampuan menjadi pemimpin yang transformative, dan selalu mendorong terjadinya perubahan. Menjadikan sekolah yang responsive gender harus mempunyai keberanian untuk melakukan perubahan, bahwa pelabelan gender yang selama ini terjadi dan membudaya telah merugikan perempuan.

Kepala sekolah mempunyai keinginan bahwa sekolah ini mempunyai branding, dalam hal ini diraih sekolah sehat, sekolah adiwiyata, dan sekolah berwawasan gender dan juara literasi. Branding ini menunjukkan kekuatan dan keunggulan sekolah, bewawasan potensi lingkungan, peluang yang ada, dukungan staf, orang tua dan masyarakat. Branding ini merupakan prioritas nilai. Mendikbud menginginkan bahwa agar sekolah memiliki branding yang unik dan khas.

Salah satu hal yang mendasari adanya branding sekolah responsive gender mengacu pada prinsip-prinsipketeraan gender dalam Islam yang dikemukakan oleh Ermagusti, (portal garuda, 8 Oktober 2017) yaitu : (1) laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah, dalam kapasitas ini tidak adaperbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya punya potensi dan peluang yang sama untk menjadi hamba yang ideal. (2) Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di

bumi. Kata khalifah disini tidak merujuk salah satu jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, karena mempunyai fungsi yang sama sebagai halifah yang akan mempertanggungjawabkan tugas kekhalfahannya. (3) Kewajiban amar maruf nahi munkar, yang ditujukan kepada semua orang tidak hanya laki-laki atau perempuan, tetapi paa orang yang mempunyai tingkat keimanan yang teguh. (4) Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Pada prinsipnya tidak membedakan hak untuk meraih prestasi apakah itu laki-laki atau perempuan.

Kepala sekolah mensosialisasikan bahwa manajemen berbasis sekolah yang responsive gender adalah mewujudkan sekolah yang berprestasi bagi peserta didik perempuan dan laki-laki dalam hal:

- a. *Prestasi akademik*; laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai prestasi akademik berbentuk nilai UN, UAN yang tinggi, juara karya ilmiah, juara lomba-lomba akademik (seperti: Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan sebagainya).
- b. *Prestasi non akademik*; laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai prestasi non akademik berupa semangat/kemauan belajar seumur hidup, mencintai ilmu, toleransi, disiplin, taat beragama, kerajinan, memiliki cita rasa seni yang tinggi.

Upaya penciptaan budaya sekolah peka gender dilakukan

- a. Menciptakan rasa aman dan nyaman tanpa ada kekerasan fisik, psikis, seksual berbasis perbedaan jenis kelamin
- b. Memberikan penghargaan dan penghormatan sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing
- c. Menghindari terjadinya diskriminasi gender baik terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan

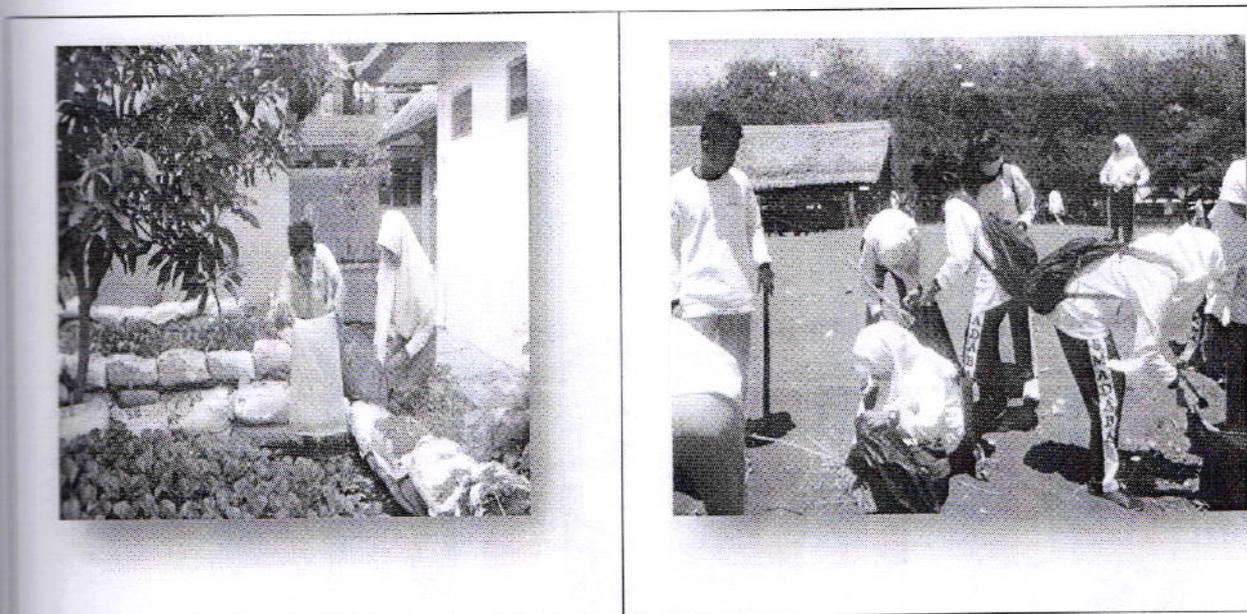
1. Menghilangkan stereotipi gender baik mengenai fungsi dan peran laki-laki maupun perempuan
2. Tidak menggunakan simbol-simbol, gambar, poster, lukisan dan bahasa verbal maupun non-verbal yang dapat menimbulkan pelecehan laki-laki maupun perempuan

2) Pemahaman guru dan Warga Sekolah tentang konsep gender

Hasil pengamatan menunjukkan di SMA N 2 Bantul sering dilakukan sosialisasi tentang gender, *branding* sekolah membawa konsekuensi semua warga sekolah memahami konsep gender. Sekolah menyediakan brosur-brosur tentang Gender yang bisa di baca di perpustakaan dan di ruang-ruang konsultasi.

Adanya pemahaman guru dan warga sekolah termasuk siswa memudahkan implementasi budaya gender di sekolah, seperti pada kegiatan :

- a. Tebar benih ikan, perawatan dan panen ikan di kolam *SMADABA* oleh kader divisi perikanan yang keanggotaannya terbuka untuk siswa putra dan putri
- b. Aksi lingkungan sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup, dilakukan secara bersama – sama oleh seluruh siswa dan warga sekolah lainnya.
- c. Merawat tanaman di *green house* merupakan agenda rutin divisi green house yang anggotanya baik siswa putra dan putri
- d. Penanaman mangrove sebagai kegiatan bakti sosial dilaksanakan oleh Kader Pembinaan Lingkungan baik siswa putra maupun putri



Gambar 1: Budaya sekolah yang responsive Gender

Pemahaman guru dan warga sekolah tentang gender mendorong tumbuhnya partisipasi aktif semua anak laki-laki dan perempuan, sehingga siswa dengan bebas untuk melakukan percobaan melalui sarana untuk mencapai prestasi yang lebih baik dan menyalurkan minat dan hobynya.

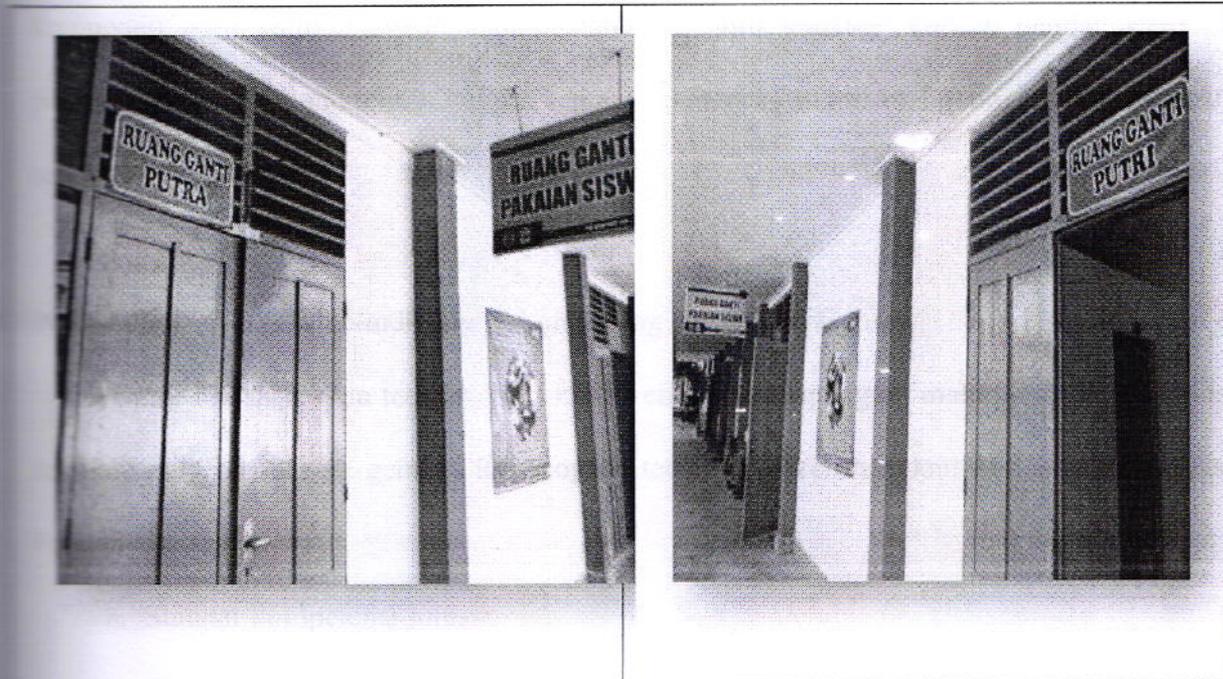
3 Sarana dan Prasarana yang responsive gender

Temuan-temuan di SMAN 2 Bantul, dalam aspek sarana dan prasarana menunjukkan: bahwa tersedia sarana-prasarana yang mempertimbangkan kebutuhan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Penyediaan fasilitas yang seimbang dan tidak terjadi dominasi pemanfaatan sarana-prasarana atas dasar perbedaan jenis kelamin.

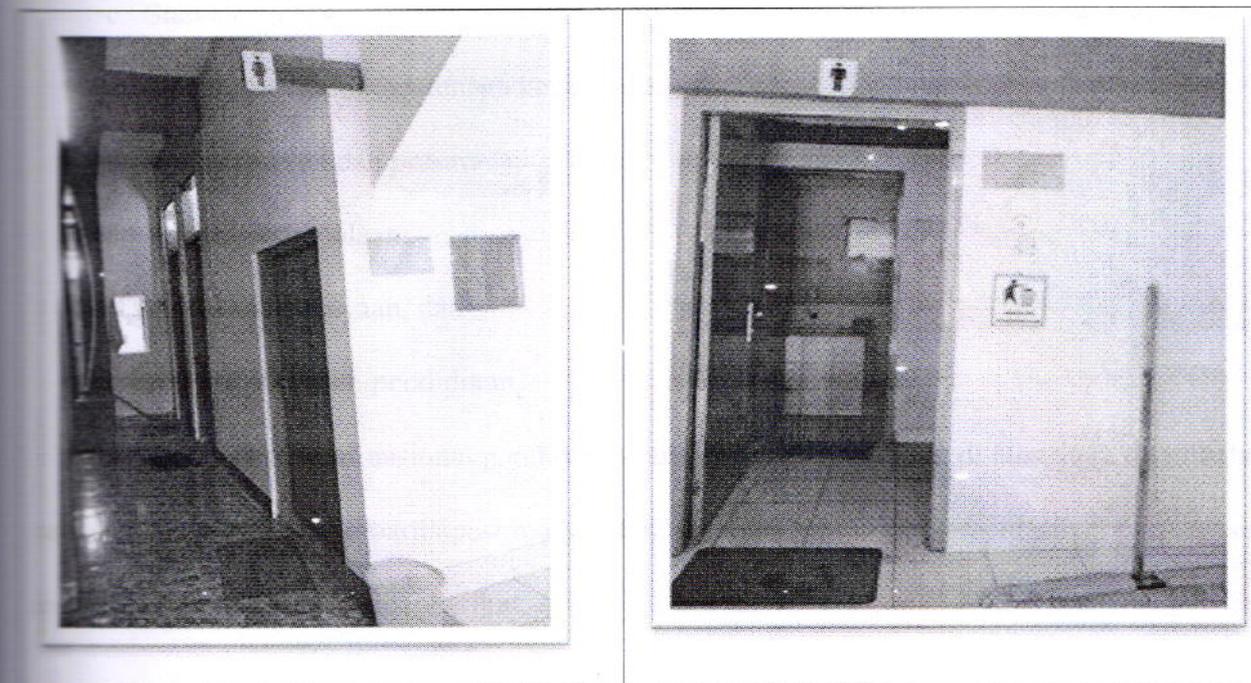
Penyediaan kamar mandi /toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan,

- a. Alat olah raga (rangen) untuk perempuan dan laki - laki di buat dengan tinggi berbeda.
- b. Jalur evakuasi mengakomodir simbol perempuan dan laki – laki
- c. Ruang laktasi disediakan dengan menjaga privasi

- d. Ruang ganti siswa terpisah untuk putra dan putri dengan 2 pintu untuk menjamin privasi
- e. Ruang perawatan untuk putra dan putri terpisah.



Gambar 2; Ruang ganti yang berbeda untuk siswa putra dan siswa putri



Gambar 3: Kamar mandi dan WC terpisah untuk putra dan putri, dengan rasio 1:25 (pi) dan 1:40 (pa)

Hasil best practice ini menunjukkan bahwa sekolah yang responsive gender mempunyai 3 komponen penting, yaitu komponen leadership yaitu peran kepala sekolah, komponen guru yaitu wawasan dan pemahaman guru tentang konsep gender, dan sarana prasarana untuk mendukung implementasi pengarus utamaan gender dalam aktivitas di sekolah.

2. Pengembangan Indikator-indikator Sekolah yang responsive Gender

Berdasarkan kajian teoritis, dan kajian empiris di lapangan, maka disusunlah rancangan sekolah yang responsive gender. Rancangan tersebut dikembangkan dari 8 Standar Nasional Pendidikan, yaitu :

- a. Standar kompetensi lulusan
- b. Standar isi
- c. Standar proses
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan,
- e. standar sarana dan prasarana,
- f. standar pengelolaan,
- g. standar pembiayaan, dan
- h. standar penilaian pendidikan.

Selain ke-8 standar nasional pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, juga ditambahkan satu standar yaitu standar partisipasi masyarakat. Adapun contoh implementasinya pada masing-masing standar adalah sebagai berikut.

a. Standar kompetensi lulusan.

Satuan pendidikan responsif gender perlu berupaya memfasilitasi pengembangan potensi akademik dan non akademik peserta didik laki-laki dan perempuan secara optimal serta mengembangkan sikap saling menghargai antara perempuan dan laki-laki. Pengembangan potensi peserta didik perlu didukung dengan adanya pemanfaatan buku teks yang responsif gender.

b. Standar isi.

Satuan pendidikan responsif gender perlu melakukan penyempurnaan kurikulum yang mengintegrasikan perspektif gender, baik pada silabus, RPP, bahan ajar, sumber belajar maupun media pembelajaran. Penanaman wawasan dan sikap positif yang relevan dengan gender dapat secara eksplisit muncul sebagai indikator pembelajaran pada komponen indikator karakter, indikator pendidikan budaya, serta ekonomi kreatif. Gender dapat menjadi bagian dari materi pembelajaran yang dirancang dalam kurikulum sekolah melalui beberapa mata pelajaran, seperti Agama, PKn, IPS, IPA, Bahasa, Olahraga, Seni Budaya, Prakarya, Matematika, dan lain-lain. Isi pelajaran dapat dikembangkan dengan memanfaatkan sumber bahan yang responsif gender seperti bahan bacaan, film, drama, laporan kasus, hasil observasi lapangan, laporan perjalanan, dan dokumen.

c. Standar proses.

Satuan pendidikan responsif gender perlu mengembangkan metode, model pembelajaran, pengelolaan kelas, pemberian penugasan serta kegiatan pembelajaran yang responsif gender. Dengan cara demikian, peserta didik laki-laki dan perempuan mendapat kesempatan dan perhatian yang sama untuk memperoleh akses dan partisipasi pembelajaran yang optimal.

d. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan.

Satuan pendidikan responsif gender perlu menyelenggarakan *in-service training* bagi guru/pendidik dan tenaga kependidikan agar bersikap responsif gender. Kegiatan ini dapat dilakukan atas inisiatif satuan pendidikan. Dengan demikian, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dikembangkan dengan perspektif gender. Dalam *in-service training*, guru/pendidik dibimbing untuk merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakannya. Model pelatihan dapat menggunakan model *lesson study* dengan salah satu fokus pada aspek gender sehingga kegiatan perencanaan, pengamatan, dan refleksi dapat menjadi kesempatan belajar bagi guru/pendidik dan *stakeholders* secara serentak.

e. Standar sarana dan prasarana.

Satuan pendidikan responsif gender perlu merancang penyediaan sarana dan prasarana seperti toilet, ruang kelas, taman sekolah, keamanan sekolah dan ruang khusus layanan yang responsive gender.

f. Standar pengelolaan.

Satuan pendidikan responsif gender perlu mengembangkan visi dan misi sekolah yang mendukung upaya mewujudkan pendidikan yang adil dan setara gender serta mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma yang menjamin kesamaan akses, partisipasi, kontrol bagi semua warga sekolah. Selain itu, sekolah perlu menyusun rencana kerja sekolah, struktur organisasi, penugasan, pengembangan karir dan promosi serta pengambilan keputusan yang memberikan kesamaan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan.

g. Standar pembiayaan.

Satuan pendidikan responsif gender perlu menerapkan perencanaan dan penganggaran pendidikan responsif gender serta menjamin adanya kesamaan akses dan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam menyusun dan memonitor penggunaan anggaran sekolah.

h. Standar penilaian.

Satuan pendidikan responsif gender perlu membuat target implementasi isu gender pada soal tes dan tugas-tugas terstruktur serta mengembangkan alat penilaian yang tidak menyulitkan salah satu jenis kelamin dalam mengerjakan soal ujian.

i. Standar partisipasi masyarakat.

Satuan pendidikan responsif gender perlu mendorong adanya komposisi pengelola komite sekolah yang terdiri atas laki-laki dan perempuan secara proporsional.

Hasil Uji Validasi dan Revisi Terhadap Indikator Sekolah yang Responsif Gender dari para Ahli

Hasil rancangan sekolah yang responsive gender, selanjutnya dibawa dalam Forum FGD yang melibatkan pakar-pakar gender terkait. Hasil FGD memberi beberapa masukan antara lain :

Tabel 1. Hasil Validasi berdasarkan FGD dari Pakar Terkait

Masukan	
1.	Apa isu gender dalam pendidikan mohon dimasukkan
2.	Tujuan instrument adalah membuat alat ukur yang responsive gender Sebaiknya setiap item ada rubriknya
3.	Indikator setiap komponen mengandung aspek kognitif, afektif dan psikomotor Bisa dikaitkan dengan K 13
4.	Pada standar isi sebaiknya dirinci, misalnya bahan ajar yang responsive gender itu yang seperti apa

5.	Pelayanan pendidikan yang memberi manfaat , harap dijelaskan pelayanan yang mana, apakah admin, ekstra kurikuler atau guru
6.	Beberapa item mengandung makna yang berbeda, sebaiknya dipisah saja
7.	Kegiatan kesiswaan, dirinci, ekstra kurikuler
8.	Untuk menyiapkan fasilitas secara umum yang berspektif gender sudah cukup dengan menyesuaikan dengan keadaan sekolah, namun untuk yang khusus perlu menganalisis input yang masuk
9.	Istilah berkeadilan gender perlu diberi deskripsi agar dapat diaplikasikan di kelas.
10.	Isu gender perlu didefinisikan secara jelas apa yang dimaksud
11.	Karena standar ini dimaksudkan bagi siswa, maka segala konsep yang digunakan terkait gender seyogyanya dideskripsikan secara terurai dan dijelaskan indikatornya.
12.	Diberi contoh materi yang responsive gender
13.	Perlu ada pembedaan adil gender, sensitive gender dan responsive gender
14.	Standar sarana dan prasarana menggunakan data terpilah
15.	Standar pembiayaan menggunakan data terpilah
16.	Dibedakan setiap partisipasi, akses dan kontrol serta manfaat pada siswa laki-laki atau perempuan
17.	Standar sarana dan prasarana dipisah antara Bimbingan konseling dan UKS dibedakan
18.	Dimasukan dalam teorinya bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam masyarakat sekolah

Masukan-masukan dari pakar tersebut, selanjutnya dijadikan bahan bagi perbaikan indikator dan item-item sekolah yang responsive gender, sehingga bisa dihasilkan indikator-indikator bagi sekolah yang responsive gender adalah : (1) Sekolah memiliki visi dan misi yang berperspektif gender, (2) Kepala sekolah memiliki karakteristik yang profesional dan sensitif gender., (3) Sekolah memiliki guru/pendidik yang profesional dan sensitif gender. (4) Sekolah mengembangkan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang responsif gender. (5) Sekolah memiliki lingkungan sekolah yang sensitif gender. (6) Sekolah memberikan layanan

pendidikan yang ramah terhadap perbedaan gender. (7) Memiliki manajemen sekolah yang responsif gender; dan (8) Memiliki Komite Sekolah responsif gender.

Selanjutnya dikaitkan dengan pemenuhan 8 (delapan) standar pendidikan nasional, sekolah responsive gender dapat dikembangkan sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Sekolah yang Responsif Gender

No	Komponen	Item	Skor		Rubrik
			Ya (1)	Tidak (0)	
1..	SKL	Pengembangan kurikulum melibatkan guru laki-laki dan guru perempuan			1. Dilakukan secara bersama-sama antara guru L dan Pr 0. Hanya melibatkan satu kelompok jenis kelamin saja
		Isu gender (kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan) dijadikan acuan dalam merumuskan standar kompetensi			1. Isu gender tentang kesenjangan L/P dijadikan landasan dalam merumuskan SKL 0. Isu gender tentang kesenjangan tidak dijadikan acuan dalam merumuskan standar perumusan SKL
		Rumusan Standar Kompetensi lulusan responsif gender (memberikan perhatian yang konsisten) terhadap perbedaan laki-laki dan perempuan			1. Rumusan SKL memberikan perhatian terhadap perbedaan L/P 0. Rumusan SKL tidak memperhatikan yang konsisten terhadap perbedaan L/P
		Pimpinan dan pengurus sekolah memahami kesenjangan /ketimpangan gender yang disebabkan nilai budaya			1. Pimpinan & pengurus sekolah memahami nilai-nilai budaya yang menjadi sebab ketimpangan gender 0. . Pimpinan & pengurus sekolah tidak memahami nilai-nilai budaya yang menjadi sebab ketimpangan gender
		Pimpinan dan pengurus sekolah memahami berbagai peraturan yang masih bias gender			1. Pimpinan dan pengurus sekolah dapat menganalisis berbagai peraturan yang masih bias gender 0. Pimpinan dan pengurus sekolah tidak mampu mendeteksi berbagai peraturan

				yang masih bias gender
		Pimpinan dan pengurus sekolah berani membuat keputusan yang memberi kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan.		<p>1. Pimpinan dan pengurus sekolah berani membuat keputusan yang memberi kesempatan yang sama kepada L/P)</p> <p>0. Pimpinan dan pengurus sekolah tidak berani membuat keputusan yang memberi kesempatan yang sama kepada L/P</p>
		Pimpinan dan pengurus sekolah memahami arti kesetaraan gender		<p>1. Pimpinan dan pengurus sekolah dapat menjelaskan arti kesetaraan gender dengan benar.</p> <p>0. Pimpinan dan pengurus sekolah tidak bisa menjelaskan/salah dalam menjelaskan arti kesetaraan gender</p>
2.	Standar Isi	Isu gender (kondisi yang menunjukkan kesenjangan L/P) dijadikan pertimbangan dalam menyepakati isi kurikulum		<p>1. Isu gender dijadikan pertimbangan dalam menyepakati isi kurikulum</p> <p>0. Isu gender tidak dijadikan pertimbangan dalam menyepakati isi kurikulum</p>
		Rancangan pembelajaran ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender, antara laki-laki dan perempuan.		<p>1. Rancangan pembelajaran ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender, antara L/P.</p> <p>0. Rancangan pembelajaran tidak ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender, antara L/P.</p>
		Materi ajar menggambarkan peran gender yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.		<p>1. Materi ajar menggambarkan peran gender yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.</p> <p>0. Materi ajar menggambarkan peran gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan.</p>
		Materi ajar tidak memberikan stereotype (pelabelan/cap) yang tidak pas antara laki-laki dan perempuan.		1.. Materi ajar tidak memberikan stereotype (pelabelan/cap) yang tidak pas antara laki-laki dan perempuan.(perempuan

				lemah, laki-laki pemberani) 0. Materi ajar memberikan pelabelan yang tidak pas pada L/P
		Materi ajar memberikan gambaran potret perempuan dan laki-laki yang dinamis		1. Materi ajar memberikan gambaran potret perempuan dan laki-laki yang dinamis. 0. Materi ajar menggambarkan superior dari salah satu jenis kelamin.
Hanya 3.	Standar Proses	Pelayanan pendidikan dari pimpinan sekolah memberi manfaat yang sama kepada laki-laki dan perempuan.		1. Pelayanan pendidikan dari pimpinan sekolah memberi manfaat yang sama kepada laki-laki dan perempuan. 2. Pelayanan pendidikan dari pimpinan sekolah cenderung pada salah satu jenis kelamin tertentu saja.
		Pelayanan bimbingan dari Bimbingan Konseling memberi manfaat sesuai dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan.		1. Pelayanan bimbingan dari Bimbingan Konseling memberi manfaat sesuai dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan. 0. Pelayanan bimbingan dari Bimbingan Konseling belum memberi manfaat sesuai dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan.
		Terdapat bukti yang nyata integrasi gender dalam materi pembelajaran		1. Ada contoh materi yang responsive gender. 0. Contoh materi tidak responsive gender
		Guru memperlakukan siswa perempuan dan laki-laki secara setara, adil sesuai dengan kebutuhannya		1. Guru memperlakukan siswa L/P secara setara dan adil 0. Guru memperlakukan memihak pada kelompok jenis kelamin tertentu
		Buku-buku referensi menampilkan contoh yang tidak memihak kepada laki-laki atau perempuan		1. Buku-buku menampilkan contoh yang adil gender/tidak memihak. 0. Buku-buku referensi memberi contoh berdasarkan pelabelan tertentu.
		Murid laki-laki dan perempuan aktif dalam mengemukakan gagasan, bertanya, dan mengkritisi		1. Murid laki-laki dan perempuan semua aktif dalam mengemukakan gagasan. 0. Hanya murid Kelompok

		gagasan yang lain tanpa perasaan minder (<i>inferior</i>) atau lebih hebat (<i>superior</i>).			tertentu saja yang aktif, yang lain minder..
		Guru mampu mendorong murid laki-laki dan perempuan untuk maju secara kompetitif			1. Guru mampu mendorong murid laki-laki dan perempuan untuk maju secara kompetitif. 0. Guru hanya mendorong kelompok tertentu saja untuk maju secara kompetitif.
		Guru mendorong siswa untuk menjadi pemimpin di kelas baik pada siswa laki-laki maupun perempuan.			1. Guru mendorong siswa untuk menjadi pemimpin di kelas baik pada siswa laki-laki maupun perempuan. 0. Guru cenderung mendorong siswa kelompok tertentu saja untuk menjadi pemimpin di kelas.
		Guru memberikan kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan untuk memperoleh akses /menggunakan sumberdaya yang sama			1. Guru memberikan kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan untuk memperoleh akses /menggunakan sumberdaya yang sama. 0. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok jenis kelamin tertentu untuk memperoleh akses.
		Guru memberikan kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan berbagai kesempatan.			1. Guru memberikan kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan berbagai kesempatan. 0. Guru cenderung memberi kesempatan kepada kelompok jenis kelamin tertentu untuk berpartisipasi dalam kegiatan berbagai kesempatan.
		Guru memberi perhatian yang sama terhadap siswa laki-laki dan perempuan pada tahapan pembelajaran			1. Guru memberi perhatian yang sama terhadap siswa laki-laki dan perempuan pada tahapan pembelajaran teori.

		teori.			2. Guru memberikan perhatian terhadap kelompok jenis kelamin tertentu dalam pembelajaran teori
		Pelaksanaan kegiatan kesiswaan memperhatikan kesetaraan gender			1. Pelaksanaan kegiatan kesiswaan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, namun beberapa hal diserakan. 0. Pelaksanaan kegiatan kesiswaan diperlakukan sama.
4.	Standar tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan	Adanya keseimbangan/proporsi guru laki-laki dan perempuan.			1. Adanya keseimbangan/proporsi guru laki-laki dan perempuan. 2. Jumlah guru didominasi laki-laki/perempuan
		Kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan lebih tinggi bagi guru laki-laki dan perempuan.			5. Kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan lebih tinggi bagi guru laki-laki dan perempuan. 1. Kesempatan cenderung diberikan pada kelompok jenis kelamin tertentu saja
		Pemahaman pendidik dalam implementasi satuan pendidikan berwawasan gender.			1. Adanya pemahaman yang baik dari pendidik tentang pengarusutamaan gender dalam pendidikan berwawasan gender. 0. Belum adanya pemahaman dari pendidik tentang pengarusutamaan gender dalam pendidikan berwawasan gender
		Pemahaman tenaga kependidikan dalam implementasi satuan pendidikan berwawasan gender.			1. Adanya pemahaman yang baik dari tenaga kependidikan tentang pengarusutamaan gender dalam pendidikan berwawasan gender. 0. Belum adanya pemahaman dari tenaga kependidikan tentang pengarusutamaan gender dalam pendidikan berwawasan gender
		Komitmen tenaga kependidikan dan pendidik dalam			1. Adanya komitmen tenaga kependidikan dalam mengimplementasi

		mengimplementasi pembelajaran yang berwawasan gender.			pembelajaran berwawasan gender. 0. Tidak adanya komitmen tenaga kependidikan dalam mengimplementasi pembelajaran berwawasan gender
		Komitmen tenaga pendidik dalam mengintegrasikan metode pembelajaran yang responsive gender.			5. Adanya komitmen dari pendidik dalam mengintegrasikan metode pembelajaran yang responsive gender. 1. Tidak adanya komitmen dari pendidik dalam mengintegrasikan metode pembelajaran yang responsive gender.
		Komitmen tenaga pendidik dalam pengelolaan kelas yang responsif gender.			1. Adanya komitmen pendidik dalam pengelolaan kelas yang responsif gender. 0. Tidak adanya komitmen pendidik dalam pengelolaan kelas yang responsif gender.
		Tidak ada kekerasan fisik dari tenaga pendidik dan kependidikan.			1. Tidak ada kekerasan fisik di sekolah . 0. Sering sekali ada kekerasan fisik terjadi di sekolah
		Tidak ada kekerasan verbal dari pendidik dan tenaga kependidikan			5. Tidak ada kekerasan verbal dari pendidik dan tenaga kependidikan 1. Tidak ada kekerasan verbal dari pendidik dan tenaga kependidikan
5.	Standar Sarana dan Prasarana	Toilet laki dan perempuan terpisah			1. Toilet laki dan perempuan terpisah 0. Toilet laki dan perempuan dijadikan satu.
		Secara proposional toilet perempuan lebih banyak dibanding laki-laki			1. Secara proposional toilet perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. 0. Tidak memikirkan proporsi jumlah toilet dengan banyaknya siswa L/P
		Penataan ruang gambar-gambar di kelas menampilkan tokoh laki dan perempuan secara proporsional)			1. Penataan ruang gambar-gambar di kelas menampilkan tokoh laki dan perempuan secara proporsional)

				0. Gambar hanya didominasi tokoh laki-laki atau perempuan saja/tidak ada gambar
		Tersedianya taman sekolah/tempat bermain laki-laki dan perempuan		1. Tersedianya taman sekolah/tempat bermain/berdiskusi 0. Tidak tersedia taman sekolah/tempat bermain/berdiskusi
		Ruangan khusus layanan ruang BP untuk laki dan perempuan,		1. Ruang/tempat khusus layanan ruang BP untuk laki-laki dan perempuan, 0. Tidak ada tempat khusus untuk layanan BP
		Tersedia ruang khusus ganti untuk perempuan,		1. Tersedia ruang khusus ganti untuk perempuan, 0. Tidak tersedia ruang khusus ganti untuk perempuan
		Ruang UKS dengan pelayanan laki-laki dan perempuan terpisah		1. Ruang UKS dengan pelayanan laki-laki dan perempuan terpisah, 0. Ruang UKS dengan pelayanan laki-laki dan perempuan bersama.
		Tersedia tempat ibadah /tempat yang terpisah antara laki-laki dengan perempuan.		1. Tersedia tempat ibadah /tempat yang terpisah/tersekat antara laki-laki dengan perempuan. 0. Tidak tersedia tempat ibadah /tempat yang terpisah/tersekat antara laki-laki dengan perempuan.
		Penyesuaan tangga sesuai dengan kemampuan perempuan dan difabel		1. Penyesuaan tangga sesuai dengan kemampuan perempuan dan difabel 0. Tangga menyulitkan bagi kaum perempuan dan difabel
		Tersedia ruang laktasi bagi guru perempuan.		1. Tersedia ruang laktasi bagi guru dan tenaga kependidikan perempuan. 0. Tidak tersedia ruang laktasi
6.	Standar pengelolaan	Visi dan misi sekolah sudah memuat jaminan adanya kesetaraan gender bagi anak laki dan perempuan		1. Visi dan misi sekolah sudah memuat jaminan adanya kesetaraan gender bagi anak laki dan perempuan. 0. Visi dan misi sekolah tidak

			menjamin kesetaraan gender bagi anak laki dan perempuan.
	.Nilai dan norma yang diakui dan dapat diterima oleh seluruh siswa baik laki dan perempuan		1. Nilai dan norma yang diakui dan dapat diterima oleh seluruh siswa baik laki dan perempuan. 0. .Nilai dan norma hanya diakui dan dapat diterima oleh sekelompok jenis kelamin saja.
	Rencana kerja sekolahn memuat aktivitas yang memberikan akses bagi laki-laki dan perempuan		1. Rencana kerja sekolahn memuat aktivitas yang memberikan akses bagi laki-laki dan perempuan . 0. Rencana Rencana kerja sekolahn belum memuat aktivitas yang memberikan akses bagi laki-laki dan perempuan
	Rencana kerja sekolahn memuat aktivitas yang memberikan partisipasi, bagi laki-laki dan perempuan		1. Rencana kerja sekolahn memuat aktivitas yang memberikan partisipasi, bagi laki-laki dan perempuan. 0. Rencana kerja sekolah belum memuat aktivitas yang memberikan partisipasi, bagi laki-laki dan perempuan
	Rencana kerja sekolahn memuat aktivitas yang memberikan kontrol dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan		1. Rencana kerja sekolahn memuat aktivitas yang memberikan kontrol dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan. 0. Rencana kerja sekolahn Belum memuat aktivitas yang memberikan kontrol dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan
	Supervisi kepala sekolah yang resposif gender		1. Supervisi kepala sekolah yang punya perhatian yang konsisten terhadap kesenjangan gender. 0. Supervisi kepala sekolah yang belum punya perhatian yang konsisten terhadap kesenjangan gender
	Komite sekolah memberikan peluang yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam kepengurusan secara proposional		1. Komite sekolah memberikan peluang yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam kepengurusan secara proposional. 0. Komite sekolah belum memberikan peluang yang

					sama kepada laki-laki dan perempuan dalam kepengurusan secara proposional.
7.	Standar Pembiayaan	Rencana kegiatan dan anggaran sekolah disusun dengan memperhatikan nilai-nilai kebutuhan laki-laki dan perempuan.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah disusun dengan memperhatikan nilai-nilai kebutuhan laki-laki dan perempuan. 0. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah belum disusun dengan memperhatikan nilai-nilai kebutuhan laki-laki dan perempuan.
		Rencana kegiatan dan anggaran dirancang dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki sebagai tindakan khusus (affirmative action)			<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kegiatan dan anggaran dirancang dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki sebagai tindakan khusus (affirmative action) 0. Rencana kegiatan dan anggaran belum dirancang dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki sebagai tindakan khusus (affirmative action)
		Rencana kegiatan dan anggaran disusun berdasarkan data pilah gender.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kegiatan dan anggaran disusun berdasarkan data pilah gender.(jenis kelamin, status) 0. Rencana kegiatan dan anggaran disusun berdasarkan data pilah gender.(jenis kelamin, status)
		Adanya perbedaan /kebutuhan antara laki-laki dengan perempuan diperhatikan.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan menekankan kebutuhan antara laki-laki dengan perempuan . 0. Standar pembiayaan menekankan kebutuhan antara laki-laki dengan

					perempuan .
8.	Standar penilaian	Penilaian adii dan setara, (penilaian yang melibatkan aspek pisik seperti olah raga mempertimbangkan standar yang berbeda antara laki-laki dan perempuan)			1. Penilaian mempertimbangkan standar yang berbeda antara laki-laki dan perempuan pada aspek tertentu. 0. Penilaian belum mempertimbangkan standar yang berbeda antara laki-laki dan perempuan pada aspek tertentu.
		Pemberian kesempatan untuk ujian/ulangan susulan karena sedang berhalangan/sakit			1. Pemberian kesempatan untuk ujian/ulangan susulan karena sedang berhalangan/sakit 0. Tidak adanya pemberian kesempatan untuk ujian/ulangan susulan karena sedang berhalangan/sakit
		Proses penilaian dilakukan secara obyektif bagi siswa laki-laki maupun perempuan.			1. Proses penilaian dilakukan secara obyektif bagi siswa laki-laki maupun perempuan. 0. Proses penilaian diwarnainya pelabelan berdasarkan jenis kelamin.

Hasil pengembangan ini menunjukkan indikator-indikator yang dikembangkan untuk menuju sekolah yang responsive gender adalah mengacu pada delapan standar pendidikan nasional, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Masing-masing standar tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi 56 butir item yang divalidasi.

5) Hasil Uji Validasi dan Revisi Terhadap Indikator Sekolah yang Responsif Gender Dari Paraguru Pada Setiap Jenjang Dan Satuan Pendidikan

Rancangan indicator sekolah yang responsive gender, selanjutnya disosialisasikan, dan sekaligus dilakukan validasi terhadap guru-guru pada berbagai satuan dan jenjang pendidikan di SD, SMP, SMA, SMK dan MAN, untuk mendapatkan tanggapan, respon dan sekaligus perbaikan bagi implementasi di sekolah-sekolah. .

Tanggapan guru-guru terhadap indikator sekolah yang responsive gender ini sangat positif, seluruh item-item dapat disetujui. Hasil validasi terhadap indikator sekolah responsive gender dapat dipahami dengan baik oleh para guru. Beberapa masukan tertulis menyarankan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Validasi dan Tanggapan Guru terhadap Indikator Sekolah Responsif Gender

NO	INDIKATOR	KETERANGAN
1..	SKL	Diperlukan contoh indikator implementasi bagi peningkatan akademik dan non akademik.
2	Standar Isi	Diperlukan pelatihan bagaimana mengintegrasikan gender dalam silabus dan RPP, bahan ajar dan media pembelajaran
3.	Standar Proses	Diperlukan pelatihan bagaimana metoda dan stategi pembelajaran yang responsive gender
4.	Standar tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan	Ada pelatihan, fasilitasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tentang kompetensi gender
5.	Standar Sarana dan Prasarana	Perlu kebijakan dan penganggaran untuk menciptakan fasilitas yang responsive gender
6.	Standar pengelolaan	Dibutuhkan kepala sekolah yang mempunyai visi tentang sekolah yang berwawasan gender
7.	Standar Pembiayaan	Perlu anggaran tersendiri bagi penerapan sekolah yang esponsif gender
8.	Standar penilaian	Perlu pengembangan penilaian yang tidak menyulitkan

Beberapa tanggapan tersebut mengindikasikan bahwa indikator-indikator sekolah yang responsive gender ini perlu tindakan yang lebih riil, sehingga dapat dirasakan kemanfaatannya oleh seluruh warga sekolah dan masyarakat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, hasil pengembangan, uji lapangan, dan analisis yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sekolah sekolah responsive gender menunjukkan 3 komponen penting, yaitu komponen leadership yaitu peran kepala sekolah, komponen guru yaitu wawasan dan pemahaman guru tentang konsep gender, dan sarana prasarana untuk mendukung implementasi pengarus utamaan gender dalam aktivitas di sekolah.
2. Indikator-indikator yang dikembangkan untuk menuju sekolah yang responsive gender adalah mengacu pada delapan standar pendidikan nasional, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Masing-masing standar tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi 56 butir item yang divalidasi.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dijumpai dalam penelitian pengembangan model CBI ini adalah:

1. Penelitian ini membatasi pada pengembangan indicator sekolah responsive gender, belum mempertimbangkan kondisi sekolah dengan berbagai variabelnya.
2. Indikator-indikator ini perlu pemahaman seluruh komponen pendidikan, mulai dari aspek kebijakan (Dinas terkait) sampai semua unsur sekolah yang dalam kenyataannya belum semua menyadari pentingnya pengarus utamaan gender dalam pendidikan.

C. Saran Pemanfaatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang terkait dengan pemanfaatan produk, yaitu produk penelitian ini dapat dijadikan alternatif untuk pengembangan dan pembudayaan sekolah yang responsive gender, sehingga implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dapat diterapkan di sekolah.

D. Diseminasi dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut.

1. Diseminasi

Diseminasi diharapkan dapat menyebar luaskan produk ke sasaran yang lebih luas terkait dengan sosialisasi produk dan sosialisasi konsep teoritik. Sosialisasi produk hendaknya dilakukan dengan menerbitkan hasil penelitian kepada pemakai, sehingga produk yang berupa instrument sekolah yang responsive gender dapat diketahui oleh pengguna, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan sekolah. Sosialisasi konsep teoritik terkait dengan penyebarluasan gagasan tentang pengembangan indikator sekolah yang responsive gender. Untuk keperluan tersebut direncanakan dilakukan publikasi hasil penelitian atau hasil pemikiran terkait dengan indikator sekolah yang responsive gender dalam upaya menyiapkan sekolah yang adil gender.

2. Pengembangan Lebih Lanjut

Terkait dengan pengembangan lebih lanjut dari upaya pengembangan produk, maka diharapkan:

Model pengembangan indikator sekolah yang responsive gender ini dapat dikembangkan menjadi model sekolah yang responsive gender, dengan penyesuaian pada sasarannya yaitu perbedaan jenjang satuan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amasari (Member of PSG LAIN), *Laporan Penelitian Pendidikan Berjuatan Gender*, (Banjannasin: IAIN Antasari, 2005), hal. 31
- Austin, J.E., Overholt, C., Anderson, M.B., and Cloud, K. (1985). Women in Development: A Framework for Project Analysis. In *Gender Roles in Development Projects: A Case Book*, edited by Catherine Overholt, Mary B. Anderson, Kathleen Cloud, and James E. Austin., 1985.
- Borg dan Gall. (1998). *Educational research* New York: Longman.
- Dirjen PLS, (2006), "Pesan Standar Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan", , Kemendiknas, Jakarta: Dirjen PLS
- Ditjen PNFI, MONE, (2008), "Modul Pendidikan Adil Gender dalam Keluarga", Jakarta: . Ditjen PNFI
- Endriana Noerdin, dkk, (2005), "Modul Latihan Analysis Gender & Anggaran Berkeadilan Gender", Jakarta: Women Research Institute (WRI).
- Hanun Asrohah, *Sosiologi Pendidikan*, (Surabaya: Kopertais Press, 2008), et. , h.178.
<https://www.facebook.com/penuliscinta>. gender dalam pendidikan. diakses jumat, 15 maret 2013
- ILO, Year "line Learning Module on Gender", ILO, Jakarta. Responsif Gender", Pattiro & The Asia Foundation, Jakarta.
- MONE, (2007), Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Jakarta: MONE
- Suharti, (2010), "Menggali Isu Strategis Gender dalam Pembangunan Pendidikan di Indonesia", Surabaya : Desember 2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- (2013). *Panduan umum PUG*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jendral Anak Usia Dini, Pendidikan non formal dan Informal. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat
- (2013) *Isu , solusi gender dalam bidang pendidikan*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jendral Anak Usia Dini, Pendidikan non formal dan Informal. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Lampiran 1

Notulen Hasil validasi dan FGD Hari/tanggal : Rabu, 9 Agustus 2017

Hasil Validasi Ahli :

1. Dr. Esi Emilia (UNIMED)
2. M. Lies Endrawati (UNY)
3. Dr. Eti Setiawati (UNIBRAW)

Peserta FGD

1. Dr. Marwanti, UNY
2. Dr Kokom Komariah, UNY
3. Dr. Esi Emilia Unimed
4. Dr. Lies Endrawati UNY
5. Dr. Eti Setiawati Unbraw
6. Valenikha Fitri Nadhira IPB
7. Yoo Eka Yana Kansil Universitas Oleo Kendari
8. Yulisyah Putri daulay UGM
9. Putu Ronita Dewi
10. Ahmad Agus Setiawan
11. Titi Mutiara Kiranawati

Masukan
19. Apa isu gender dalam pendidikan mohon dimasukan
20. Tujuan instrument adalah membuat alat ukur yang responsive gender
21. Sebaiknya setiap item ada rubriknya
22. Indikator setiap komponen mengandung aspek kognitif, afektif dan psikomotor
23. Bisa dikaitkan dengan K 13
24. Pada standar isi sebaiknya dirinci, misalnya bahan ajar yang responsive gender itu yang seperti apa
25. Pelayanan pendidikan yang memberi manfaat , harap dijelaskan pelayanan yang mana, apakah admin, ekstra kurikuler atau guru
26. Beberapa item mengandung makna yang berbeda, sebaiknya dipisah saja
27. Kegiatan kesiswaan, dirinci, ekstra kurikuler
28. Untuk menyiapkan fasilitas secara umum yang berspektif gender sudah cukup dengan menyesuaikan dengan keadaan sekolah, namun untuk yang khusus perlu menganalisis input yang masuk
29. Istilah berkeadilan gender perlu diberi deskripsi agar dapat diaplikasikan di kelas.
30. Isu gender perlu didefinisikan secara jelas apa yang dimaksud
31. Karena standar ini dimaksudkan bagi siswa, maka segala konsep yang digunakan terkait gender seyogyanya dideskripsikan secara terurai dan dijelaskan indikatornya.
32. Diberi contoh materi yang responsive gender
33. Perlu ada pembedaan adil gender, sensitive gender dan responsive gender
34. Standar sarana dan prasarana menggunakan data terpilih

35. Standar pembiayaan menggunakan data terpilah
36. Dibedakan setiap partisipasi, akses dan kontrol serta manfaat pada siswa laki-laki atau perempuan
37. Standar sarana dan prasarana dipisah antara Bimbingan konseling dan UKS dibedakan
38. Dimasukan dalam teorinya bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam masyarakat sekolah

Lampiran 2. Materi Pelatihan

PENGEMBANGAN INDIKATOR SEKOLAH YANG RESPONSIF GENDER

Oleh :

Kokom Komariah

Pusat Studi Wanita dan Gender

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Universitas Negeri Yogyakarta

A. Pendahuluan

Berbagai masalah yang masih dihadapi di Indonesia saat ini adalah masih tingginya angka kemiskinan, dimana pada tahun 2011 mencapai 16,08%, laju pertumbuhan ekonomi yang masih relatif rendah. Infrastruktur masih kurang merata, serta ketimpangan antar wilayah cukup tinggi, menuntut penanganan di berbagai bidang, baik bidang kependudukan, ekonomi, ketenagakerjaan, social dan bidang pendidikan.

Kemiskinan berwajah perempuan, pendidikan akan terkait dengan masalah ekonomi, dimana akses dan kontrol sumberdaya perempuan bisa ditemukan di berbagai level, ketimpangan upah, akses kepada pekerjaan dan pengembangan karier. Hal ini menunjukkan bahwa mengurangi kesenjangan berbasis gender bukan hal yang mudah, harus diperjuangkan dari berbagai segi, termasuk menciptakan sekolah yang responsive gender.

Penduduk adalah sumberdaya sekaligus penerima manfaat pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas menjadi modal dalam pembangunan, namun sumberdaya yang tidak atau kurang berkualitas akan menjadi beban dalam pembangunan. Jumlah penduduk di DIY tahun 2016 sebanyak 3.720.912, dimana 50,55% adalah perempuan, artinya jumlah perempuan lebih banyak dibanding dengan penduduk laki-laki, di semua kabupaten/kota, kecuali kabupaten Sleman dimana jumlah perempuan lebih sedikit dibanding dengan laki-laki. (Hasil analisis Isu Gender, BPPM: 2017).

Pendidikan merupakan kunci keberhasilan masa depan, karena melalui pendidikan masyarakat dibekali perangkat sikap, cara pandang dan nilai-nilai yang relevan untuk masa mendatang. Oleh karena itu pendidikan yang relevan adalah pendidikan yang mampu

memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, kebutuhan masyarakat, maupun kebutuhan pembangunan.

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, seperti pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi dosen, melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Namun kualitas pendidikan nasional tetap memprihatinkan, solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan belum ditemukan.

Sekolah sebagai wadah pendidikan formal sangat penting dalam membentuk dan menyiapkan dan memposisikan individu pada golongan atau strata tertentu di dalam masyarakat. Secara umum lembaga ini diwarnai oleh kemampuan ekonomi seseorang atau sekelompok tertentu, aspek politik, budaya dan ideologi gender.

Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pendidikan mengamanatkan agar setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya. Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, (tiga lintas bidang "cross cutting issue" dalam pembangunan: Pembangunan berkelanjutan, *Good government*).

Kebijakan pengarusutamaan gender dibangun berdasarkan strategi untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integrasi dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Tujuannya adalah mempersempit dan meniadakan kesenjangan gender yang mengantarkan pada pencapaian keteraan dan keadilan gender. Salah satu kunci yang menjadi prasyarat dalam implementasi pengarusutamaan gender adalah sumberdaya yang memadai, yang meliputi sumberdaya manusia yang memiliki kesadaran, kepekaan, respon, keterampilan, dan motivasi yang kuat dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di unitnya, dan adanya sumber dana dan sarana yang memadai untuk melaksanakan pengarusutamaan gender. .

Isu gender adalah suatu isu ketidakadilan, kesenjangan atau ketimpangan terhadap laki-laki atau perempuan, yang bersifat sistemik, dirasakan oleh sebagian besar orang dan di banyak tempat, mendesak diselesaikan, karena memiliki daya ungkit kepada penyelesaian isu lain bila isu tersebut diselesaikan.

Kesejangan gender terjadi dalam berbagai bidang pendidikan, karena minimnya pengetahuan warga sekolah tentang permasalahan gender, sehingga dapat diamati beberapa fenomena yang terjadi di sekolah antara lain: (1) materi bahan ajar pada umumnya masih bias gender, (2) proses pembelajaran di kelas belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif secara seimbang antara peserta didik laki-laki dan perempuan; (3) lingkungan fisik sekolah belum menjawab kebutuhan spesifik anak laki-laki dan perempuan; dan (4) pengelolaan pendidikan belum dilaksanakan kearah adil gender atau memberikan peluang yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Fenomena tersebut harus diatasi, dengan cara memberi wawasan kepada warga sekolah, bagaimana kriteria sekolah yang responsive gender, sehingga sekolah dapat menciptakan iklim akademis yang terdiri dari aspek pembelajaran, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang mendukung adanya integrasi keadilan dan kesetaraan gender di bidang pendidikan.

Pentingnya dipunyai sekolah yang responsive gender adalah Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pendidikan mengamanatkan agar setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya. Selain itu Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, (tiga lintas bidang "cross cutting issue" dalam pembangunan: Pembangunan berkelanjutan dan Good government)

Mensikapi hal ini Dinas Pendidikan di DIY telah merespon program pemerintah dengan mensosialisasikan sekolah yang responsive gender. Namun berbagai kendala ditemui, antara lain secara mendasar gender belum dipahami secara jelas, sehingga perangkat sekolah dan guru masih kesulitan menterjemahkan bagaimana sekolah yang responsive gender.

Indikator sekolah yang responsive gender secara sporadis telah dicanangkan, namun pengembangannya untuk berbagai satuan pendidikan berdasarkan setiap jenjang satuan pendidikan belum terinci secara jelas, karena selama ini berbagai hal ditemui misalnya materi /bahan ajar pada umumnya masih bias gender, proses pembelajaran di kelas belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif secara seimbang antara peserta didik laki-laki dan perempuan; lingkungan fisik sekolah belum menjawab kebutuhan spesifik anak laki-laki dan

perempuan; dan pengelolaan pendidikan belum dilaksanakan kearah adil gender atau memberikan peluang yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Pengembangan indikator-indikator bagi sekolah yang responsive gender perlu dilakukan, sehingga diharapkan dapat dihasilkan acuan bagi sekolah untuk mengatasi berbagai kendala dalam menyosialisasikan sekolah yang responsive gender.

Komponen standar mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan++, mencakup:

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi
3. Standar proses
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan,
5. standar sarana dan prasarana,
6. standar pengelolaan,
7. standar pembiayaan, dan
8. standar penilaian pendidikan.

Selain ke-8 standar nasional pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, juga ditambahkan satu standar yaitu standar partisipasi masyarakat

Pada standar kompetensi lulusan, satuan pendidikan responsif gender perlu berupaya memfasilitasi pengembangan potensi akademik dan non akademik peserta didik laki-laki dan perempuan secara optimal serta mengembangkan sikap saling menghargai antara perempuan dan laki-laki. Pengembangan potensi peserta didik perlu didukung dengan adanya pemanfaatan buku teks yang responsif gender.

PADA STANDAR ISI, satuan pendidikan responsif gender perlu melakukan penyempurnaan kurikulum yang mengintegrasikan perspektif gender, baik pada silabus, RPP, bahan ajar, sumber belajar maupun media pembelajaran. Penanaman wawasan dan sikap positif yang relevan dengan gender dapat secara eksplisit muncul sebagai indikator pembelajaran pada komponen indikator karakter, indikator pendidikan budaya, serta ekonomi kreatif. Gender dapat menjadi bagian dari materi pembelajaran yang dirancang dalam kurikulum sekolah melalui beberapa mata pelajaran, seperti Agama, PKn, IPS, IPA, Bahasa, Olahraga, Seni Budaya, Prakarya, Matematika, dan lain-lain. Isi

pelajaran dapat dikembangkan dengan memanfaatkan sumber bahan yang responsif gender seperti bahan bacaan, film, drama, laporan kasus, hasil observasi lapangan, laporan perjalanan, dan dokumen.

PADA STANDAR PROSES, satuan pendidikan responsif gender perlu mengembangkan metode, model pembelajaran, pengelolaan kelas, pemberian penugasan serta kegiatan pembelajaran yang responsif gender. Dengan cara demikian, peserta didik laki-laki dan perempuan mendapat kesempatan dan perhatian yang sama untuk memperoleh akses dan partisipasi pembelajaran yang optimal.

Pada **standar pendidikan dan tenaga kependidikan**, satuan pendidikan responsif gender perlu menyelenggarakan *in-service training* bagi guru/pendidik dan tenaga kependidikan agar bersikap responsif gender. Kegiatan ini dapat dilakukan atas inisiatif satuan pendidikan. Dengan demikian, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dikembangkan dengan perspektif gender. Dalam *in-service training*, guru/pendidik dibimbing untuk merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakannya. Model pelatihan dapat menggunakan model *lesson study* dengan salah satu fokus pada aspek gender sehingga kegiatan perencanaan, pengamatan, dan refleksi dapat menjadi kesempatan belajar bagi guru/pendidik dan *stakeholders* secara serentak.

Pada **standar sarana dan prasarana**, satuan pendidikan responsif gender perlu merancang penyediaan sarana dan prasarana seperti toilet, ruang kelas, taman sekolah, keamanan sekolah dan ruang khusus layanan yang responsive gender.

Pada **standar pengelolaan**, satuan pendidikan responsif gender perlu mengembangkan visi dan misi sekolah yang mendukung upaya mewujudkan pendidikan yang adil dan setara gender serta mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma yang menjamin kesamaan akses, partisipasi, kontrol bagi semua warga sekolah. Selain itu, sekolah perlu menyusun rencana kerja sekolah, struktur organisasi, penugasan, pengembangan karir dan promosi serta pengambilan keputusan yang memberikan kesamaan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan.

Pada standar pembiayaan, satuan pendidikan responsif gender perlu menerapkan perencanaan dan penganggaran pendidikan responsif gender serta menjamin adanya kesamaan akses dan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam menyusun dan memonitor penggunaan anggaran sekolah.

Pada **standar penilaian**, satuan pendidikan responsif gender perlu membuat target implementasi isu gender pada soal tes dan tugas-tugas terstruktur serta mengembangkan alat penilaian yang tidak menyulitkan salah satu jenis kelamin dalam mengerjakan soal ujian.

Pada **standar partisipasi masyarakat**, satuan pendidikan responsif gender perlu mendorong adanya komposisi pengelola komite sekolah yang terdiri atas laki-laki dan perempuan secara proporsional.

PRODUK PENGEMBANGAN

INDIKATOR SEKOLAH RESPONSIF GENDER



Marwanti
Wagiran
Sri Wening
Kokom Komariah

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN
2017

PRODUK PENGEMBANGAN

INDIKATOR SEKOLAH RESPONSIF GENDER



Marwanti
Wagiran
Sri Wening
Kokom Komariah

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN
2017

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya buku yang merupakan produk penelitian yang berjudul “ **INDIKATOR SEKOLAH YANG RESPONSIF GENDER**” dapat diselesaikan. Isu gender adalah suatu isu ketidakadilan, kesenjangan atau ketimpangan terhadap laki-laki atau perempuan, yang bersifat sistemik, yang mendesak diselesaikan. Kesejangan gender terjadi dalam berbagai bidang pendidikan, karena minimnya pengetahuan warga sekolah tentang permasalahan gender.

Produk penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi sekolah yang akan menerapkan sekolah yang responsive gender, pada setiap jenjang satuan pendidikan, baik jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia.

Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada kepala Kepala LPPM, teman sejawat yang telah membantu melalui kegiatan diskusi sehingga hasilnya dapat diimplementasikan untuk pengembangan kegiatan pembelajaran yang responsive gender.

Akhir kata, kami berharap semoga buku ini bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia yang lebih adil gender.

Yogyakarta, 20 Oktober 2017

Penyusun

Kokom Komariah
Fitri Rahmawai
Minta Harsana

Indikator Sekolah yang Responsif Gender

No	Komponen	Item	Skor		Rubrik
			Ya (1)	Tidak (0)	
1.	SKL	Pengembangan kurikulum melibatkan guru laki-laki dan guru perempuan			1. Dilakukan secara bersama-sama antara guru L dan Pr 0. Hanya melibatkan satu kelompok jenis kelamin saja
		Isu gender (kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan) dijadikan acuan dalam merumuskan standar kompetensi			1. Isu gender tentang kesenjangan L/P dijadikan landasan dalam merumuskan SKL 0. Isu gender tentang kesenjangan tidak dijadikan acuan dalam merumuskan standar perumusan SKL
		Rumusan Standar Kompetensi lulusan responsif gender (memberikan perhatian yang konsisten) terhadap perbedaan laki-laki dan perempuan			1. Rumusan SKL memberikan perhatian terhadap perbedaan L/P 0. Rumusan SKL tidak memperhatikan yang konsisten terhadap perbedaan L/P
		Pimpinan dan pengurus sekolah memahami kesenjangan /ketimpangan gender yang disebabkan nilai budaya			1. Pimpinan & pengurus sekolah memahami nilai-nilai budaya yang menjadi sebab ketimpangan gender 0. . Pimpinan & pengurus sekolah tidak memahami nilai-nilai budaya yang menjadi sebab ketimpangan gender
		Pimpinan dan pengurus sekolah memahami berbagai peraturan yang masih bias gender			1. Pimpinan dan pengurus sekolah dapat menganalisis berbagai peraturan yang masih bias gender 0. Pimpinan dan pengurus sekolah tidak mampu mendeteksi berbagai peraturan yang masih bias gender
		Pimpinan dan pengurus sekolah berani membuat keputusan yang memberi kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan.			1. Pimpinan dan pengurus sekolah berani membuat keputusan yang memberi kesempatan yang sama kepada L/P) 0. Pimpinan dan pengurus sekolah tidak berani membuat

				keputusan yang memberi kesempatan yang sama kepada L/P
		Pimpinan dan pengurus sekolah memahami arti kesetaraan gender		<p>1. Pimpinan dan pengurus sekolah dapat menjelaskan arti kesetaraan gender dengan benar.</p> <p>0. Pimpinan dan pengurus sekolah tidak bisa menjelaskan/salah dalam menjelaskan arti kesetaraan gender</p>
2.	Standar Isi	Isu gender (kondisi yang menunjukkan kesenjangan L/P) dijadikan pertimbangan dalam menyepakati isi kurikulum		<p>1. Isu gender dijadikan pertimbangan dalam menyepakati isi kurikulum</p> <p>0. Isu gender tidak dijadikan pertimbangan dalam menyepakati isi kurikulum</p>
		Rancangan pembelajaran ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender, antara laki-laki dan perempuan.		<p>1. Rancangan pembelajaran ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender, antara L/P.</p> <p>0. Rancangan pembelajaran tidak ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender, antara L/P.</p>
		Materi ajar menggambarkan peran gender yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.		<p>1. Materi ajar menggambarkan peran gender yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.</p> <p>0. Materi ajar menggambarkan peran gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan.</p>
		Materi ajar tidak memberikan stereotype (pelabelan/cap) yang tidak pas antara laki-laki dan perempuan.		<p>1.. Materi ajar tidak memberikan stereotype (pelabelan/cap) yang tidak pas antara laki-laki dan perempuan.(perempuan lemah, laki-laki pemberani)</p> <p>0. Materi ajar memberikan pelabelan yang tidak pas pada L/P</p>
		Materi ajar memberikan gambaran potret perempuan dan laki-laki yang dinamis		<p>1. Materi ajar memberikan gambaran potret perempuan dan laki-laki yang dinamis.</p>

				0. Materi ajar menggambarkan superior dari salah satu jenis kelamin.
Hanya 3.	Standar Proses	Pelayanan pendidikan dari pimpinan sekolah memberi manfaat yang sama kepada laki-laki dan perempuan.		1. Pelayanan pendidikan dari pimpinan sekolah memberi manfaat yang sama kepada laki-laki dan perempuan. 2. Pelayanan pendidikan dari pimpinan sekolah cenderung pada salah satu jenis kelamin tertentu saja.
		Pelayanan bimbingan dari Bimbingan Konseling memberi manfaat sesuai dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan.		1. Pelayanan bimbingan dari Bimbingan Konseling memberi manfaat sesuai dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan. 0. Pelayanan bimbingan dari Bimbingan Konseling belum memberi manfaat sesuai dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan.
		Terdapat bukti yang nyata integrasi gender dalam materi pembelajaran		1. Ada contoh materi yang responsive gender. 0. Contoh materi tidak responsive gender
		Guru memperlakukan siswa perempuan dan laki-laki secara setara, adil sesuai dengan kebutuhannya		1. Guru memperlakukan siswa L/P secara setara dan adil 0. Guru memperlakukan memihak pada kelompok jenis kelamin tertentu
		Buku-buku referensi menampilkan contoh yang tidak memihak kepada laki-laki atau perempuan		1. Buku-buku menampilkan contoh yang adil gender/tidak memihak. 0. Buku-buku referensi memberi contoh berdasarkan pelabelan tertentu.
		Murid laki-laki dan perempuan aktif dalam mengemukakan gagasan, bertanya, dan mengkritisi gagasan yang lain tanpa perasaan minder (<i>inferior</i>) atau lebih hebat (<i>superior</i>).		1. Murid laki-laki dan perempuan semua aktif dalam mengemukakan gagasan. 0. Hanya murid Kelompok tertentu saja yang aktif, yang lain minder..
		Guru mampu mendorong murid laki-laki dan perempuan untuk maju secara kompetitif		1. Guru mampu mendorong murid laki-laki dan perempuan untuk maju secara kompetitif. 0. Guru hanya mendorong

			kelompok tertentu saja untuk maju secara kompetitif.
	Guru mendorong siswa untuk menjadi pemimpin di kelas baik pada siswa laki-laki maupun perempuan.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mendorong siswa untuk menjadi pemimpin di kelas baik pada siswa laki-laki maupun perempuan. 0. Guru cenderung mendorong siswa kelompok tertentu saja untuk menjadi pemimpin di kelas.
	Guru memberikan kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan untuk memperoleh akses /menggunakan sumberdaya yang sama		<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru memberikan kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan untuk memperoleh akses /menggunakan sumberdaya yang sama. 0. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok jenis kelamin tertentu untuk memperoleh akses.
	Guru memberikan kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan berbagai kesempatan.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru memberikan kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan berbagai kesempatan. 0. Guru cenderung memberi kesempatan kepada kelompok jenis kelamin tertentu untuk berpartisipasi dalam kegiatan berbagai kesempatan.
	Guru memberi perhatian yang sama terhadap siswa laki-laki dan perempuan pada tahapan pembelajaran teori.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru memberi perhatian yang sama terhadap siswa laki-laki dan perempuan pada tahapan pembelajaran teori. 2. Guru memberikan perhatian terhadap kelompok jenis kelamin tertentu dalam pembelajaran teori
	Pelaksanaan kegiatan kesiswaan memperhatikan kesetaraan gender		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan kesiswaan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, namun beberapa hal diserakan.

				0. Pelaksanaan kegiatan kesiswaan diperlakukan sama.
4.	Standar tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan	Adanya keseimbangan/proporsi guru laki-laki dan perempuan.		1. Adanya keseimbangan/proporsi guru laki-laki dan perempuan. 2. Jumlah guru didominasi laki-laki/perempuan
		Kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan lebih tinggi bagi guru laki-laki dan perempuan.		5. Kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan lebih tinggi bagi guru laki-laki dan perempuan. 1. Kesempatan cenderung diberikan pada kelompok jenis kelamin tertentu saja
		Pemahaman pendidik dalam implementasi satuan pendidikan berwawasan gender.		1. Adanya pemahaman yang baik dari pendidik tentang pengarusutamaan gender dalam pendidikan berwawasan gender. 0. Belum adanya pemahaman dari pendidik tentang pengarusutamaan gender dalam pendidikan berwawasan gender
		Pemahaman tenaga kependidikan dalam implementasi satuan pendidikan berwawasan gender.		1. Adanya pemahaman yang baik dari tenaga kependidikan tentang pengarusutamaan gender dalam pendidikan berwawasan gender. 0. Belum adanya pemahaman dari tenaga kependidikan tentang pengarusutamaan gender dalam pendidikan berwawasan gender
		Komitmen tenaga kependidikan dan pendidik dalam mengimplementasi pembelajaran yang berwawasan gender.		1. Adanya komitmen tenaga kependidikan dalam mengimplementasi pembelajaran berwawasan gender. 0. Tidak adanya komitmen tenaga kependidikan dalam mengimplementasi pembelajaran berwawasan gender
		Komitmen tenaga pendidik dalam		5. Adanya komitmen dari pendidik dalam

		mengintegrasikan metode pembelajaran yang responsive gender.			mengintegrasikan metode pembelajaran yang responsive gender. 1. Tidak adanya komitmen dari pendidik dalam mengintegrasikan metode pembelajaran yang responsive gender.
		Komitmen tenaga pendidik dalam pengelolaan kelas yang responsif gender.			1. Adanya komitmen pendidik dalam pengelolaan kelas yang responsif gender. 0. Tidak adanya komitmen pendidik dalam pengelolaan kelas yang responsif gender.
		Tidak ada kekerasan fisik dari tenaga pendidik dan kependidikan.			1. Tidak ada kekerasan fisik di sekolah . 0. Sering sekali ada kekerasan fisik terjadi di sekolah
		Tidak ada kekerasan verbal dari pendidik dan tenaga kependidikan			5. Tidak ada kekerasan verbal dari pendidik dan tenaga kependidikan 1. Tidak ada kekerasan verbal dari pendidik dan tenaga kependidikan
5.	Standar Sarana dan Prasarana	Toilet laki dan perempuan terpisah			1. Toilet laki dan perempuan terpisah 0. Toilet laki dan perempuan dijadikan satu.
		Secara proposional toilet perempuan lebih banyak dibanding laki-laki			1. Secara proposional toilet perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. 0. Tidak memikirkan proporsi jumlah toilet dengan banyaknya siswa L/P
		Penataan ruang gambar-gambar di kelas menampilkan tokoh laki dan perempuan secara proporsional)			1. Penataan ruang gambar-gambar di kelas menampilkan tokoh laki dan perempuan secara proporsional) 0. Gambar hanya didominasi tokoh laki-laki atau perempuan saja/tidak ada gambar
		Tersedianya taman sekolah/tempat bermain laki-laki dan perempuan			1. Tersedianya taman sekolah/tempat bermain/berdiskusi . 0. Tidak tersedia taman sekolah/tempat

				bermain/berdiskusi
		Ruangan khusus layanan ruang BP untuk laki dan perempuan,		1. Ruangan/tempat khusus layanan ruang BP untuk laki-laki dan perempuan, 0. Tidak ada tempat khusus untuk layanan BP
		Tersedia ruang khusus ganti untuk perempuan,		1. Tersedia ruang khusus ganti untuk perempuan, 0. Tidak tersedia ruang khusus ganti untuk perempuan
		Ruang UKS dengan pelayanan laki-laki dan perempuan terpisah		1. Ruang UKS dengan pelayanan laki-laki dan perempuan terpisah, 0. . Ruang UKS dengan pelayanan laki-laki dan perempuan bersama.
		Tersedia tempat ibadah /tempat yang terpisah antara laki-laki dengan perempuan.		1. Tersedia tempat ibadah /tempat yang terpisah/tersekat antara laki-laki dengan perempuan. 0. Tidak tersedia tempat ibadah /tempat yang terpisah/tersekat antara laki-laki dengan perempuan.
		Penyesuaan tangga sesuai dengan kemampuan perempuan dan difabel		1. Penyesuaan tangga sesuai dengan kemampuan perempuan dan difabel 0. Tangga menyulitkan bagi kaum perempuan dan difabel
		Tersedia ruang laktasi bagi guru perempuan.		1. Tersedia ruang laktasi bagi guru dan tenaga kependidikan perempuan. 0. Tidak tersedia ruang laktasi
6.	Standar pengelolaan	Visi dan misi sekolah sudah memuat jaminan adanya kesetaraan gender bagi anak laki dan perempuan		1. Visi dan misi sekolah sudah memuat jaminan adanya kesetaraan gender bagi anak laki dan perempuan. 0. Visi dan misi sekolah tidak menjamin kesetaraan gender bagi anak laki dan perempuan.
		.Nilai dan norma yang diakui dan dapat diterima oleh seluruh siswa baik laki dan perempuan		1. Nilai dan norma yang diakui dan dapat diterima oleh seluruh siswa baik laki dan perempuan. 0. .Nilai dan norma hanya diakui dan dapat diterima oleh sekelompok jenis kelamin saja.
		Rencana kerja sekolah		1. Rencana kerja sekolah

		memuat aktivitas yang memberikan akses bagi laki-laki dan perempuan			memuat aktivitas yang memberikan akses bagi laki-laki dan perempuan . 0. Rencana Rencana kerja sekolah belum memuat aktivitas yang memberikan akses bagi laki-laki dan perempuan
		Rencana kerja sekolah memuat aktivitas yang memberikan partisipasi, bagi laki-laki dan perempuan			1. Rencana kerja sekolah memuat aktivitas yang memberikan partisipasi, bagi laki-laki dan perempuan. 0. Rencana kerja sekolah belum memuat aktivitas yang memberikan partisipasi, bagi laki-laki dan perempuan
		Rencana kerja sekolah memuat aktivitas yang memberikan kontrol dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan			1. Rencana kerja sekolah memuat aktivitas yang memberikan kontrol dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan. 0. Rencana kerja sekolah Belum memuat aktivitas yang memberikan kontrol dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan
		Supervisi kepala sekolah yang resposif gender			1. Supervisi kepala sekolah yang punya perhatian yang konsisten terhadap kesenjangan gender. 0. Supervisi kepala sekolah yang belum punya perhatian yang konsisten terhadap kesenjangan gender
		Komite sekolah memberikan peluang yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam kepengurusan secara proposional			1. Komite sekolah memberikan peluang yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam kepengurusan secara proposional. 0. Komite sekolah belum memberikan peluang yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam kepengurusan secara proposional.
7.	Standar Pembiayaan	Rencana kegiatan dan anggaran sekolah disusun dengan memperhatikan			1. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah disusun dengan memperhatikan

		nilai-nilai kebutuhan laki-laki dan perempuan.			nilai-nilai kebutuhan laki-laki dan perempuan. 0. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah belum disusun dengan memperhatikan nilai-nilai kebutuhan laki-laki dan perempuan.
		Rencana kegiatan dan anggaran dirancang dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki sebagai tindakan khusus (affirmative action)			1. Rencana kegiatan dan anggaran dirancang dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki sebagai tindakan khusus (affirmative action) 0. Rencana kegiatan dan anggaran belum dirancang dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki sebagai tindakan khusus (affirmative action)
		Rencana kegiatan dan anggaran disusun berdasarkan data pilah gender.			1. Rencana kegiatan dan anggaran disusun berdasarkan data pilah gender. (jenis kelamin, status) 0. Rencana kegiatan dan anggaran disusun berdasarkan data pilah gender. (jenis kelamin, status)
		Adanya perbedaan /kebutuhan antara laki-laki dengan perempuan diperhatikan.			1. Standar pembiayaan menekankan kebutuhan antara laki-laki dengan perempuan . 0. Standar pembiayaan menekankan kebutuhan antara laki-laki dengan perempuan .
8.	Standar penilaian	Penilaian adil dan setara, (penilaian yang melibatkan aspek fisik seperti olah raga mempertimbangkan standar yang berbeda antara laki-laki dan perempuan)			1. Penilaian mempertimbangkan standar yang berbeda antara laki-laki dan perempuan pada aspek tertentu. 0. Penilaian belum mempertimbangkan standar yang berbeda antara laki-laki

					dan perempuan pada aspek tertentu.
		Pemberian kesempatan untuk ujian/ulangan susulan karena sedang berhalangan/sakit			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian kesempatan untuk ujian/ulangan susulan karena sedang berhalangan/sakit 0. Tidak adanya pemberian kesempatan untuk ujian/ulangan susulan karena sedang berhalangan/sakit
		Proses penilaian dilakukan secara obyektif bagi siswa laki-laki maupun perempuan.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penilaian dilakukan secara obyektif bagi siswa laki-laki maupun perempuan. 0. Proses penilaian diwarnainya pelabelan berdasarkan jenis kelamin.